

**REVITALISASI
EKONOMI INDONESIA**
Bisnis, Politik, dan Good Governance



Brighten
press

Revitalisasi Ekonomi Indonesia

Bisnis, Politik, dan Good Governance

Penulis : Susilo Bambang Yudhoyono

Penerbit: Brighten Press

Cetakan pertama: April 2003

Cetakan kedua: Juni 2003

Versi PDF: Juni 2004

Prakata Penulis

Permintaan Brighten Institute untuk menerbitkan makalah seminar berjudul “*Revitalisasi Ekonomi Indonesia: Bisnis, Politik dan Good Governance*”, yang saya kedepankan sebagai pidato kunci di hadapan forum diskusi panel yang diselenggarakan oleh Magister Manajemen Agribisnis, Institut Pertanian Bogor di Jakarta, 5 April 2003 yang lalu, tentu saja saya sambut dengan senang hati. Dengan demikian pikiran dan ajakan saya kepada semua pihak untuk turut serta dan berkontribusi dalam upaya pembangunan kembali ekonomi Indonesia menuju kemakmuran bersama bangsa yang sungguh berkeadilan dapat lebih disebarluaskan ke khalayak luas.

Tidak ada permasalahan nasional yang tidak dapat dipecahkan apabila kita semua memiliki semangat, kesadaran, tanggung-jawab dan kemudian mengatasinya secara bersama-tetap menjadi keyakinan kuat saya. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar, dengan tradisi dan warisan kesejarahan yang besar pula; oleh karenanya, seberat apapun persoalan yang dihadapi oleh negeri ini mesti dapat dicarikan solusinya. Itulah sebabnya, di dalam banyak kesempatan dan di hadapan banyak forum saya selalu mengajak semua pihak untuk senantiasa menjadi bagian dari solusi dan bukan sebaliknya menjadi bagian dari masalah, apalagi jika gemar menciptakan masalah itu sendiri.

Lahirnya pemikiran dan penulisan buku kecil saya ini didorong oleh kepedulian dan tanggung-jawab saya sebagai anak bangsa untuk ikut memecahkan permasalahan ekonomi nasional yang kita hadapi dewasa ini dalam cita-citanya menuju ke kemakmuran bersama, dengan tema besar *membangun hubungan yang sehat, harmonis dan sinergis* antara tiga institusi negara yang utama, yaitu Negara, Pasar dan Masyarakat, sebagai pencipta iklim dan penggerak utama pembangunan bangsa masa kini dan masa depan. Agenda dan tugas besar ini tidak boleh hanya kita bebankan kepada para politisi, ekonom atau tokoh-tokoh masyarakat semata. Tugas ini adalah tugas kita bersama.

Selanjutnya pada forum yang baik ini saya ingin menyampaikan terimakasih kepada Saudara Joyo Winoto, Ph.D. dan Saudara

Hermanto Siregar, Ph.D. serta para scholars di Brighten Institute yang telah mengedit naskah yang saya siapkan sehingga menjadi bentuknya seperti sekarang ini. Saya juga ingin mengucapkan terimakasih kepada saudara Arifin dan saudara Dian yang bermalam-malam membantu saya mengetik naskah tulisan tangan yang telah saya siapkan. Akhirnya, secara khusus saya sampaikan penghargaan dan terimakasih yang tulus pada istri tercinta, Ani Bambang Yudhoyono, yang dengan setia dan penuh pengertian selalu menemani dan mendampingi saya hampir di setiap waktu.

Secara umum, buku ini saya persembahkan kepada rakyat Indonesia. Dan, secara khusus buku ini saya persembahkan pada petani, nelayan, buruh, dan pekerja informal yang mengilhami saya untuk menuliskan buku ini. Saya berharap, buku ini bisa secara bersama mengilhami kita untuk membangun harapan-harapan baru bagi terwujudnya tatanan ekonomi politik baru yang sehat di masa datang.

SBY

Indonesia Ke Depan : Adakah Kebangkitan Dunia Usaha Menuju Kemakmuran Bersama?

Gugatan dan Kegelisahan Bersama

Krisis berkepanjangan yang kita rasakan sampai saat ini melahirkan gugatan dan kegelisahan rakyat yang dampaknya juga bisa berkepanjangan. Gugatan dan kegelisahan rakyat ini umumnya diungkapkan dalam bentuk pertanyaan generik :“Kapan Indonesia benar-benar ke luar dari krisis dan kemudian bangkit kembali?”.

Gugatan dan kegelisahan ini menuntut peran kepemimpinan untuk menyelesaikannya. Rakyat, tentu, punya kesabaran untuk menjaga harapan-harapannya tetap hidup. Harapan bahwa pemimpin-pemimpin politiknya akan segera mengeluarkannya dari krisis. Tapi, rakyat juga punya batas kemampuan dan kesabaran untuk mempertahankan harapan-harapannya tersebut.

Dengan sedikit frustrasi, rakyat melanjutkan gugatan dan kegelisahannya melalui pertanyaan, “Mengapa negara-negara lain yang juga terkena krisis kini telah pulih dan telah membangun kembali perekonomian dalam negerinya dengan capaian yang baik?”; atau : “Sampai kapan rakyat harus bersabar untuk menunggu pulih dan bangkitnya perekonomian nasional, yang juga menandai tingkat kesejahteraan mereka?” Pertanyaan kritis seperti ini tentu dapat diperpanjang dan tentu masih banyak lagi—lebih banyak dari jawaban yang tersedia.

Pertanyaan-pertanyaan di atas —yang mencerminkan gugatan dan kegelisahan—wajar lahir dari rakyat yang menaruh harapan pada pemimpin-pemimpinnya. Walaupun kita merasakan bahwa pertanyaan-pertanyaan tersebut ada yang bersifat emosional dan kadang bias, tetapi kita juga menyadari bahwa pertanyaan-pertanyaan tulus rakyat tersebut harus bisa disikapi secara baik. Tidak hanya karena

pertanyaan-pertanyaan tersebut sungguh layak diajukan tetapi juga adalah tugas para pemimpin untuk terus membangun harapan, mengembangkan peluang, dan mencari jalan terbaik bagi rakyat sehingga dari waktu ke waktu rakyat memiliki pilihan-pilihan sah yang terus berkembang untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidupnya.

Meskipun tulisan ini tidak bermaksud mengupas tuntas pertanyaan-pertanyaan di atas dan juga tidak bermaksud untuk memberikan jawaban paripurna atas pertanyaan-pertanyaan di atas, tetapi mendengarkan dan memikirkan dengan hati dan pikiran terbuka atas gugatan dan kegelisahan rakyat tersebut, termasuk mendengarkan keluhan dan harapan dari saudara-saudara kita di berbagai daerah, dari berbagai lapisan masyarakat dan dari berbagai profesi, tentulah merupakan sikap yang bijak. Bahkan bagi mereka yang memiliki otoritas, dan kemampuan untuk menentukan pilihan-pilihan, mengambil keputusan dan memformulasikan kebijakan publik, kesediaan untuk mendengar dan memikirkan suara-suara rakyat tersebut bukan hanya bijak, tetapi juga amat bermanfaat bagi embanan tugasnya dalam melahirkan dan melaksanakan kebijakan publik yang berkualitas dan yang dimiliki oleh seluruh komponen masyarakat. Di masa lalu, ruang kebijakan dan akses rakyat terhadap ruang kebijakan seperti ini tidak banyak tersedia; namun, dalam alam demokratisasi dewasa ini interaksi dan komunikasi publik dalam ruang-ruang pembuatan kebijakan seperti ini merupakan keniscayaan sekaligus kebutuhan.

Perbincangan yang saya lakukan dengan banyak pihak dari berbagai daerah, dari berbagai lapisan masyarakat, dan dari berbagai profesi secara terus menerus —dari waktu ke waktu—dengan topik yang amat beragam —politik, ekonomi, sosial, budaya, hukum dan HAM, serta keamanan—sering dan terus memberikan inspirasi yang memperkuat semangat saya untuk ikut memperbaiki negeri ini.

Dalam tulisan ini, saya akan mengartikulasikan gugatan, kegelisahan, keluhan, dan harapan rakyat di atas —tanpa bermaksud untuk memberikan jawaban serba tuntas kecuali kerangka berpikir bersama yang harus kita uji dalam proses perwujudannya ke depan—dengan melihat hubungan antara masyarakat, bisnis, dan politik dalam kerangka pembangunan ekonomi ke depan, yaitu untuk membangun kemakmuran bersama yang berkeadilan.

Untuk itu, saya akan membebaskan diri saya dengan menggunakan konsep-konsep yang umum dipahami tanpa harus terperangkap

pada istilah-istilah teknis ekonomi atau pun politik; walau, tentu, prinsip-prinsip kesahihan akan gagasan yang tertuang di sini akan tetap saya jaga dan junjung tinggi. Untuk memulai pemaparan, saya akan mengangkat butir-butir hasil pembicaraan saya dengan berbagai kalangan yang saya pandang cukup penting dan relevan dengan topik tulisan ini.

Masyarakat dan Dunia Usaha Bersuara

Keprihatinan, kegelisahan, dan keluhan masyarakat —yang berdiskusi dengan saya di berbagai kesempatan dalam kunjungan saya ke daerah-daerah, ke berbagai pasar tradisional dan pusat-pusat pertokoan, ke daerah-daerah konflik, ke barak-barak prajurit, ke sekolah-sekolah, ke universitas-universitas, ke perkampungan-perkampungan nelayan, dan ke berbagai pelosok pedesaan dan pertanian di tanah air—berada dalam kisaran yang sangat luas. Mereka menyuarakan berbagai hal, dari kegelisahannya atas perpolitikan yang terus diwarnai pertikaian sampai beban hidupnya yang semakin berat.

Dalam bahasa yang mereka suarakan dan kondisi yang mereka rasakan, masyarakat, di antaranya, memprihatinkan dan mengeluhkan:

- Mengapa reformasi yang telah berlangsung 5 tahun ini belum mendatangkan kebaikan bagi negeri ini, baik secara politik, ekonomi, sosial, hukum maupun keamanan? Adakah yang salah dengan cara-cara kita mengelola reformasi ini?
- Bagaimana sebenarnya kita memaknai kehidupan politik yang demokratis dan demokrasi itu sendiri? Adakah demokrasi memberi legitimasi dan jastifikasi bahwa demi kebebasan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat (*public order*) boleh dikorbankan?
- Apakah memang tidak ada jalan ke arah rekonsiliasi nasional yang sejati, sehingga para elit politik dan komponen masyarakat yang pernah terlibat dalam konflik masa lalu tidak terus terpecah dan bermusuhan?
- Meskipun upaya pemulihan dan pembangunan ekonomi akibat krisis itu memerlukan waktu, sesungguhnya strategi dan cetak biru yang ditetapkan seperti apa? Tidak dapatkah dilakukan berbagai percepatan agar ekonomi kita dapat segera bangkit kembali?
- Sejauh mana komitmen bersama antara pemerintah dengan dunia usaha untuk bersama-sama memulihkan perekonomian nasional, serta menggerakkan kembali perekonomian yang melibatkan rakyat kita?

- Mengapa masyarakat kita mudah sekali memilih cara kekerasan untuk menyelesaikan konflik yang ada, dan mengapa jalan perdamaian (*peaceful conflict resolution*) menjadi sesuatu yang mahal? Cara apa yang benar-benar efektif untuk menumbuhkan kembali harmoni, toleransi dan kohesi sosial yang tinggi dalam kehidupan masyarakat kita?
- Meskipun reformasi di bidang hukum amat tidak mudah, karena di samping berkaitan dengan segi struktural (sistem, undang-undang, kelembagaan dan profesionalitas penegak hukum) juga menyangkut segi kultural (menyangkut moral dan etika para penegak hukum serta juga sangat berpulang kepada disiplin dan kepatuhan masyarakat untuk mematuhi ketentuan hukum yang berlaku), apakah tidak saatnya *law enforcement* itu dijalankan dengan lebih serius? Tidakkah semua ini untuk memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat?
- Meskipun gangguan keamanan di tanah air dua tahun terakhir ini terus membaik, kecuali di Aceh yang memang khas, dapatkah stabilitas dan keamanan nasional ini benar-benar dipulihkan sehingga dapat dibangun kondisi keamanan yang lebih berkelanjutan (*sustainable*)?

Khusus di bidang ekonomi dan dunia usaha, mereka mengidentifikasi dan mengedepankan permasalahan-permasalahan sebagai berikut:

- Harga-harga kebutuhan pokok masih dirasakan terlalu tinggi. Sandang, pangan, dan papan walau tersedia sulit untuk menggapainya. Beras, gula dan lauk terus meningkat harganya. Dokter dan obat semakin mahal untuk didapatkan (bahkan ada di antara mereka yang bilang untuk bisa berobat ke dukun saja rasanya sudah semakin tidak terjangkau). Pendidikan anak tak pelak terkorbakan, bahkan banyak di antaranya yang harus putus sekolah.
- Pekerjaan masih sulit didapatkan. Angka pengangguran masih tetap tinggi. Bahkan, banyak di antara mereka yang terpaksa harus menganggur karena perusahaan tempat dia bekerja bangkrut atau karena adanya pengurangan pekerja.
- Jangan tanya daya beli. Menurut mereka, sudah semakin banyak waktu yang dicurahkan untuk bekerja, termasuk dengan curahan waktu dan tenaga perempuan dalam keluarga untuk membantu ekonomi keluarga, namun kebutuhan pokok masih juga belum

terjangkau apalagi untuk kebutuhan di luar kebutuhan pokok.

- Produk-produk pertanian dihargai murah karena harus bersaing dengan produk luar negeri yang katanya mutunya lebih baik. Biaya usahatani semakin meningkat di tengah harga produk pertanian yang tidak meningkat sesuai dengan peningkatan biaya produksi.
- Produk perikanan tidak langsung bisa dipasarkan oleh nelayan, yang berarti harus menanggung biaya tambahan untuk melakukan penyimpanan. Hasil tangkapan ikan semakin rendah jumlah dan kualitasnya karena lingkungan perairan yang sudah semakin buruk.
- Jalan-jalan pertanian dan jaringan-jaringan irigasi semakin banyak yang rusak karena kurangnya pemeliharaan dan kurang memadainya jumlah dana pemeliharaan.
- Jalan-jalan umum semakin banyak yang rusak, listrik semakin mahal, dan telepon semakin mahal pula.
- Mereka sudah ingin segera keluar dari krisis dan ingin kehidupan yang lebih baik, terutama untuk bisa mengembangkan keluarganya secara lebih baik.
- Para penganggur mengharapkan dunia bisnis dapat segera bergerak, sehingga mereka bisa bekerja kembali.

Secara umum, masyarakat —dalam kesabaran dan kepatuhannya—mengharapkan para pemimpin politik untuk segera mengeluarkan mereka dari beban kehidupan yang semakin berat dan segera membangun kehidupan bersama yang lebih baik. Mereka mengharapkan proses reformasi yang sedang berlangsung justru bisa mengangkat kehidupan mereka pada tataran yang lebih tinggi.

Di tengah harapan masyarakat akan bangkitnya dunia usaha, dunia usaha juga menyuarakan keprihatinannya sendiri. Keprihatinan dan keluhan kalangan dunia usaha yang dapat saya kenali dan simpulkan adalah bahwa iklim usaha yang kondusif bagi kebangkitan dunia usaha masih belum terwujud benar. Ketidakpastian dan hambatan berusaha, termasuk dari sebagian pejabat pemerintah dan anggota legislatif, masih dirasakan. Masalah ketenagakerjaan dan kepastian hukum juga dipandang belum mendapatkan pengelolaan yang efektif. Akibatnya, dunia usaha sulit berkembang, kurang kompetitif dan menanggung dampak ekonomi biaya tinggi.

Untuk menyebut beberapa, dari perbincangan saya dengan para

pengusaha kelas menengah dari Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Aceh, Sumatera Selatan dan Nusa Tenggara Barat, berikut ini saya ke depanan pendapat dan keluhan mereka :

- Peraturan yang ada di daerah sering kacau dan tumpang-tindih.
- Pengelolaan masalah perburuhan sering tidak konstruktif.
- Pemerasan pajak dan pungutan liar masih sering terjadi.
- Dengan kolusi yang saling menguntungkan antara sebagian pengusaha dan oknum penguasa maka tumbuh bisnis perjudian dan kegiatan ilegal lainnya.
- Banyak pejabat daerah yang bak raja kecil menetapkan aturan semauanya sendiri.
- Perusahaan sering menerima input tenaga kerja yang ternyata keterampilan dan pengetahuannya jauh di bawah standar, dan tentunya ini berkaitan dengan mutu dan kebijakan pendidikan yang menjadi tanggung jawab pemerintah.
- Kurang adil dan kurang seimbang antara kewajiban swasta untuk membayar pajak, menampung tenaga kerja dan ikut membangun lingkungan sekitarnya di satu sisi, dengan perlindungan pemerintah yang kurang memadai ketika perusahaan menghadapi permasalahan sosial, politik dan keamanan di sisi yang lain.
- Praktek tender atas proyek-proyek yang menggunakan anggaran belanja pemerintah sering tidak transparan.

Sudah barang tentu permasalahan yang diangkat oleh kaum pengusaha menengah tersebut bersifat kontekstual, situasional serta mencerminkan lingkungan dan kepentingan dunia usaha di wilayah masing-masing. Jika kemudian saya lanjutkan dengan pandangan asosiasi dunia usaha dan organisasi profesi, dapat saya kemukakan sebagai berikut :

- Perlu dibangun kultur baru dunia usaha di Indonesia dengan membangun dan mengembangkan kelompok menengah yang benar-benar professional yang memiliki etika bisnis yang memenuhi standar kehidupan bisnis yang dapat diterima bersama.
- Sektor ekonomi yang terbukti berhasil menjadi sandaran dan relatif mampu bertahan ketika Indonesia diguncang krisis, seperti sektor pertanian dan usaha kecil dan menengah (UKM) harusnya mendapatkan prioritas untuk lebih dikembangkan di masa depan.
- Demi kepentingan para petani, tanpa terlalu banyak mengorban-

kan daya saing produk pertanian yang kita hasilkan, diperlukan kebijakan yang tepat dan konsisten mengenai pangan pokok, terutama perberasan dan pergulaan.

- Sektor perikanan merupakan peluang bisnis yang menjanjikan, kiranya pemerintah dapat lebih mengembangkan sektor ini di masa depan.
- Komoditas kelapa sawit, yang potensi produksi dan pasarnya besar harus dipacu perkembangannya.
- Usaha-usaha informal yang banyak dimasuki masyarakat di saat perekonomian sedang lesu hendaknya dibangkitkan menjadi usaha-usaha formal sehingga pemerintah bisa memberikan perlindungan dan memfasilitasi perkembangannya.
- Agar dunia usaha segera dapat bangkit, kebijakan perpajakan yang tidak adil dan biaya-biaya siluman harus ditiadakan.
- Kebijakan dan peraturan yang dikeluarkan pemerintah sebaiknya “*simple*”, yang penting sungguh dijalankan dan dipatuhi.

Pengamatan para pengusaha terhadap diri dan lingkungannya tersebut, termasuk bagaimana dimensi politik dan peran pemerintah yang dapat memberikan pengaruh dan implikasi kepada mereka, patut kita renungkan untuk pembahasan lebih lanjut. Cara pandang demikian amat penting, agar kita terhindar dari kesalahan berpikir bahwa seolah-olah maju mundurnya suatu perekonomian nasional terletak pada peran dan kinerja pemerintah semata, sedang yang lainnya diletakkan pada nomor sekian. Paradigma bengkok seperti ini harus kita buang jauh-jauh.

Adalah benar bahwa peran pemerintah tetap penting, sekalipun dalam sistem perekonomian liberal. Hal tersebut analog dengan tetap pentingnya peran pemerintah (baca: *nation-state*) dalam lingkungan sistem pasar terbuka. Namun, perlu diingat bahwa selalu ada empat pelaku ekonomi, yakni rumah tangga, swasta/perusahaan, pemerintah dan pelaku bisnis asing. Keempat pelaku ekonomi inilah yang sesungguhnya menggerakkan perekonomian nasional, yang akumulasi kinerjanya tercermin pada output nasional atau pendapatan nasional, yang secara kuantitatif dinyatakan dalam besaran GNP atau GDP atau dengan ukuran lain yang bersifat kualitatif. Dalam realitasnya, sektor swasta adalah pelaku aktif dalam menggerakkan roda perekonomian dalam tataran aturan main yang disepakati bersama. Pemerintah berperan penting dalam menyusun serta menegakkan aturan main terse-

but, dan sampai batas tertentu memiliki posisi sentral dalam mengawasi pelaksanaan kesepakatan itu.

Pemerintah juga memiliki fungsi penting sebagai penyeimbang peran antara perusahaan-perusahaan besar dan perusahaan kecil dan menengah (UKM) serta antara perusahaan dengan masyarakat. Fungsi penting seperti ini dimiliki oleh pemerintah negara-negara maju maupun berkembang. Dengan demikian, pertanyaan yang kritis bukanlah, “Adakah keterlibatan pemerintah dalam perekonomian merupakan hal penting?”; namun, “Peran apakah yang seharusnya dimainkan pemerintah agar para pelaku ekonomi dan masyarakat secara luas dapat menjalankan fungsinya masing-masing secara optimal?”

Untuk melihat secara proporsional peran pemerintah dalam perekonomian, kita layak untuk menyimak apa yang dikatakan oleh Stiglitz (1997), seorang pemenang hadiah Nobel bidang ekonomi mengenai pemerintah-pemerintah di Asia Timur sebagai berikut :

“There is widespread consensus that government played an active role, a far more active role than that of governments in most developed countries. In most of the East Asian countries, they created marketlike institutions, such as banks. In some, as Korea, they controlled the allocation of much of the capital. Even today, the government there appoints the heads of all private banks. They encouraged private firms to undertake certain activities (and used economic instruments, both carrots and sticks, to obtain private sector cooperation). When the private sector did not undertake the desired activities, they undertook them : Both Korea and Taiwan constructed highly efficient steel mills. They picked entrepreneurs to undertake some projects and lent them the requisite capitals. Government interventions were, if not heavy-handed, at least ubiquitous”.

(“Ada kesepakatan dan pemahaman umum bahwa pemerintah memainkan peranan sangat penting bahkan lebih aktif dari pemerintah di negara-negara maju. Di banyak negara di Asia Timur, pemerintah mengembangkan lembaga-lembaga yang berfungsi seperti pasar, misalnya bank. Di banyak negara di wilayah ini, semisal Korea Selatan, pemerintah mengendalikan alokasi modal dalam jumlah yang signifikan; bahkan, juga menunjuk pimpinan-pimpinan bank swasta. Pemerintah mendorong perusahaan swasta untuk menjalankan suatu aktivitas tertentu (dengan menggunakan ins-

trumen ekonomi yang memberikan insentif maupun disinsentif untuk menciptakan kerjasama sektor swasta). Jika sektor swasta tidak menjalankan aktivitas yang dimaksud sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan, pemerintah mengambil alih aktivitas tersebut : Korea Selatan dan Taiwan membangun pabrik baja yang sangat efisien. Pemerintah-pemerintah tersebut menunjuk wiraswastawan-wiraswastawan untuk menjalankan aktivitas-aktivitas penting dengan meminjamkan modal yang diperlukan. Campur tangan pemerintah, jika tidak bisa dikatakan terlalu dalam, setidaknya kita temukan di mana-mana”¹.

Adakah Kebangkitan Dunia Usaha?

Meskipun saya belum menggambarkan keadaan perekonomian nasional berikut dunia usahanya pasca krisis, dewasa ini telah menjadi pengetahuan umum bahwa situasi perekonomian belum pulih benar—pertumbuhan hanya sekitar rata-rata 3,5 persen dalam 3 tahun terakhir dengan nilai PDB (Produk Domestik Bruto) yang belum besar, yaitu baru mencapai Rp. 1.610 triliun pada tahun 2002. Jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia sebelum krisis yang rata-rata sekitar 7 persen, hal ini mengindikasikan bahwa situasi perekonomian kita masih membuat dunia usaha kita relatif stagnan. Oleh karenanya, menjadi wajar jika bukan hanya para pengusaha atau masyarakat melainkan juga pihak lain yang mempertanyakan apakah perekonomian nasional dan dunia usaha Indonesia akan dan dapat bangkit kembali. Jika jawabannya ya, berapa lama lagi?

Sebagai bangsa yang bertanggung jawab pada masa depannya dan sekaligus pada generasi selanjutnya, jawaban yang harus kita berikan harus sangat positif dan yakin bahwa perekonomian dan dunia usaha Indonesia akan bangkit kembali. Kita harus bersatu, melangkah bersama dan bekerja keras untuk kepentingan nasional yang amat fundamental itu. Ekonomi Indonesia bukan hanya kita pulihkan dan kemudian kita bangun kembali, tetapi baik secara struktural maupun kultural harus dilakukan revitalisasi dan reformasi.

Pemulihan dan rekonstruksi ekonomi penting kita lakukan agar kita segera berada pada tingkat pertumbuhan yang setara dengan sebelum krisis dengan sumber-sumber pertumbuhan yang berkuali-

1 Terjemahan bebas penulis atas sitiran di atas.

tas, dan kemudian kita pacu lebih jauh lagi untuk dapat mengatasi persoalan ekonomi yang sangat mendasar seperti pengangguran, kemiskinan dan pembangunan infrastruktur. Sedangkan reformasi dan revitalisasi dengan mengukuhkan tatanan ekonomi, memperkuat fundamental ekonomi, serta membangun *good governance* dalam lingkungan perekonomian nasional perlu kita lakukan secara sungguh-sungguh agar perekonomian kita tahan terhadap berbagai goncangan, memiliki tingkat efisiensi dan produktivitas yang tinggi, dan dapat mencegah dan sekaligus menindak tegas praktek korupsi, kolusi dan nepotisme, sehingga menjadi perekonomian yang berkelanjutan.

Faktor-faktor di atas merupakan keharusan untuk bangkitnya ekonomi Indonesia. Seiring dengan membaiknya faktor-faktor tersebut kita yakini dunia usaha Indonesia akan bangkit dan tumbuh kembali secara berkeadilan. Kita layak meyakini hal ini, bukan hanya karena kita mau dan mampu untuk melakukannya tetapi sejarah membuktikan bahwa krisis juga anugerah. Arnold C. Harberger (2001), seorang pioner dalam teori ekonomi pembangunan, dalam tulisannya *The View from the Trenches Development Proseses and Policies as Seen by a Working Professional*, menyatakan bahwa :

“History tells us that major crises open multiple windows of opportunity and that in placid times government rarely get the chance to institute major reforms; if they do, the reforms are likely to be in selected areas that fate and history conspire to bring under the spotlight the public attention while the particular government holds the reins of power”.

(“Sejarah mengajarkan kita bahwa krisis besar membuka peluang lahirnya kesempatan yang tak hingga di mana pada situasi biasa pemerintah jarang memiliki kesempatan untuk melembagakan perubahan yang mendasar; kalau, pemerintah melakukannya, umumnya hanya perubahan-perubahan yang tidak mendasar bagi isu-isu yang sedang disoroti masyarakat; selebihnya, pemerintah akan lebih aman kekuasaannya dengan tidak melakukan perubahan-perubahan yang mendasar”)²

2 Terjemahan bebas penulis atas sitiran di atas.

Akan Datangkah Kemakmuran Bersama yang Berkeadilan?

Kemakmuran bersama yang berkeadilan, dan bukan kemakmuran kelompok tertentu atau orang-orang tertentu, adalah amanat konstitusi. Sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 —preamble konstitusi negara ini sesungguhnya mencerminkan dan memantapkan semangat dan nilai-nilai dasar bangsa Indonesia— seperti yang ditunjukkan oleh kata-kata “memajukan kesejahteraan umum” dan “dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Inilah rumusan azasi dari kemakmuran bersama yang berkeadilan tersebut.

Layak kiranya kita senantiasa mengingat pesan dari para pendiri negara ini mengenai bagaimana negara kita seharusnya dibangun. Pada tanggal 21 November 1950, pada dua kesempatan yang berbeda di Medan, Bung Hatta mengingatkan kita bahwa :

“Tujuan kita bukan semata-mata Indonesia Merdeka yang berdaulat, tetapi Indonesia Merdeka bagi kita hanya suatu syarat untuk mencapai Indonesia yang adil dan makmur”

“Walau kita sekarang telah merdeka dan berdaulat, kita belum mencapai apa yang kita tuju ialah Indonesia yang adil dan makmur. Mencapai hidup yang makmur! Mencapai negara yang dapat memenuhi keadilan sosial, itulah tujuan kita! Kemerdekaan hanyalah satu cara kita bisa menyelenggarakan apa yang kita cita-citakan. Kemerdekaan berarti mempunyai kekuasaan sendiri, dan dengan kekuasaan itu kita bisa menyelenggarakan apa yang selama ini menjadi cita-cita rakyat kita. Indonesia yang merdeka dan berdaulat telah kita selenggarakan. tinggal lagi pekerjaan yang lebih berat, yaitu mencapai Indonesia yang adil dan makmur”

Kemakmuran bersama ini perlu kita angkat kembali bukan semata-mata karena merupakan amanat konstitusi, dan bukan pula karena setelah 58 tahun Indonesia merdeka kemakmuran bersama itu belum dapat kita capai. Kemakmuran bersama perlu kita perhatikan kembali karena telah terjadi ketimpangan dan kepincangan dalam realitas kehidupan bersama kita sebagaimana ditandai dengan besarnya kemiskinan (dengan ukuran apapun yang digunakan); sementara, sege-lintir rakyat Indonesia memiliki kekayaan yang luar biasa. Saya tidak tahu apa yang ada di benak Adam Smith (1723-1790) ketika mener-

bitkan buku *The Wealth of Nation* atau lengkapnya berjudul *An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations*, ataupun yang ada pada pikiran dasar Karl Marx (1818-1883) ketika menulis *Capital*, dan kemudian bersama Friedrich Engels menerbitkan buku *Manifesto of the Communist Party*. Boleh jadi mereka berpikir tentang kemakmuran dan keadilan sebuah bangsa, tentu dalam perspektif masing-masing. Boleh jadi pula kedua tokoh yang pikiran-pikirannya telah mengubah kehidupan masyarakat dunia tersebut, memberikan pemaknaan sendiri-sendiri terhadap paradigma keadilan dan kemakmuran, termasuk konsep dan jalan yang perlu ditempuh untuk menuju kehidupan bangsa yang adil dan makmur itu.

Tetapi, satu hal yang menguatkan kehendak dan determinasi kita sebagai bangsa Indonesia untuk terus berjuang menciptakan kemakmuran bersama yang berkeadilan ini ialah karena sejak negara ini berdiri telah lahir dan bersemi cita-cita seperti itu. Cita-cita itulah yang sering dituturkan dalam bahasa Jawa: “*Gemah ripah, loh jinawi, toto tenterem, karto raharjo*”. Cita-cita ini bukanlah keinginan belaka, melainkan sesuatu yang secara aktual dapat kita capai. Sumberdaya alam Indonesia sungguh besar dan potensial untuk dikembangkan. Misalnya lahan pertanian kita mencapai 49,4 juta hektar, dan 9,7 juta hektar daripadanya berupa lahan tidur yang jika dimanfaatkan bisa menjadi sumber-sumber kesejahteraan rakyat dan tentu akan memberikan sumbangan produksi pertanian yang cukup signifikan. Demikian pula dengan sumberdaya yang masih relatif besar dalam sektor perikanan laut. Manajemen yang benar atas sumber daya alam tersebut dan sumberdaya alam lainnya, yang dilakukan oleh sumberdaya manusia yang terampil dan kalangan swasta yang handal dengan mendayagunakan kapital sosial, akan benar-benar menunjang tercapainya cita-cita kemakmuran bersama. Penguasaan teknologi ke depan tentu akan semakin baik, sehingga paduan antara sumber daya alam, teknologi dan manajemen yang efektif akan benar-benar menghasilkan kinerja perekonomian nasional yang dapat terus mendorong berkembangnya kemakmuran bersama yang berkeadilan.

Kegagalan Dunia Usaha dan Ekonomi Indonesia : Pelajaran Dari Krisis

Mengapa Ekonomi Indonesia Runtuh?

Ketajaman analisis dan kejujuran mengakui runtuhnya ekonomi Indonesia akibat krisis yang lalu amat diperlukan agar kita tidak mengalami nasib yang sama di masa depan. Hal ini juga dimaksud untuk memperkokoh sistem dan fundamental ekonomi kita, termasuk melalui pengembangan aturan main yang adil dan penuh kepastian. Banyak kajian dan analisis yang membahas latar belakang dan penyebab utama dari jatuhnya ekonomi Indonesia akibat hantaman krisis tahun 1997 yang lalu.

Di bawah ini saya kedepankan daftar dari penyebab krisis dan kejatuhan ekonomi Indonesia :

- Secara regional dan dari aspek geo-ekonomi, Indonesia mendapatkan efek berantai dari krisis moneter yang terjadi di Thailand dan Korea Selatan (*the contagion effect*).
- Sebagai rangkaian dari efek berantai tersebut, di dalam negeri terjadi spekulasi dan perilaku panik yang luar biasa, diikuti dengan gelombang pemindahan modal keluar negeri (*capital flight*) yang bergerak sangat cepat.
- Kebijakan pemerintah Indonesia untuk merespons krisis moneter tersebut, meskipun kemudian resepnya juga disusun secara bersama dengan IMF, dinilai tidak tepat. Kesalahan kebijakan ini termasuk sebagai faktor penyebab terjadinya krisis perbankan yang strukturnya sebenarnya sudah lemah, sekaligus sebagai pemicu meledaknya hutang dalam negeri.
- Secara struktural, cukup banyak yang menilai bahwa krisis ekonomi disebabkan oleh hubungan politik dengan bisnis (*crony*

capitalism), terutama hubungan antara pemerintah dan pengusaha yang tidak sehat yang pada gilirannya mengakibatkan kesalahan yang bersifat sistemik serta menimbulkan inefisiensi dan disfungsi struktural.

- Bentuk lain dari hubungan tidak sehat antar penguasa dan pengusaha seperti disinggung di atas adalah kroniisme, yang memangsa sumberdaya dan output ekonomi kita dalam skala yang besar.
- Absennya *good governance* pada pemerintahan yang lalu, yang sesungguhnya merupakan turunan dari kegagalan institusi negara dalam membangun dan menegakkan aturan hukum, juga merupakan faktor penyebab yang bersifat struktural.

Kesimpulan utama yang dapat kita bangun dari penyebab-penyebab jatuhnya Indonesia ke dalam krisis ekonomi sedahsyat itu adalah paduan dari faktor eksternal dan faktor internal, paduan dari tatanan yang tidak sehat yang bersifat struktural (yang membudaya dan lembaga) dan faktor-faktor yang sifatnya situasional, serta paduan antara faktor-faktor yang di luar kontrol dan sentuhan dan kesalahan kebijakan serta pengelolaan. Dan, yang juga mendasar adalah, terbangunnya suatu pola hubungan kolusif antara penguasa dan pengusaha sehingga banyak fungsi-fungsi publik dan fungsi-fungsi kemasyarakatan yang campur aduk, baik dari perspektif langkah politik penguasa maupun dari bisnis para pelaku ekonomi. Hal ini mengakibatkan pondasi ekonomi kita melemah dan menyisakan persoalan-persoalan struktural dan sistemik yang sampai saat ini masih kita rasakan akibatnya.

Mengapa Dunia Usaha Ambruk?

Lemahnya bangun dan struktur ekonomi politik nasional yang ditopang oleh persekutuan tidak sehat atau kolusif antara penguasa dan pengusaha tidak mampu menahan efek berantai yang bergerak dari Thailand dan Korea. Ketidakmampuan bangun dan struktur ekonomi politik nasional dalam menghadapi goncangan eksternal inilah yang menyebabkan ambruknya ekonomi nasional. Pertumbuhan ekonomi menurun tajam, nilai tukar rupiah jatuh pada tingkat yang sulit dibayangkan oleh dunia usaha sebelumnya, dan disertai dampak ikutan lainnya. Hal inilah yang menyebabkan ambruknya dunia usaha.

Lebih lanjut, dari sisi penerimaan agregat, turunnya PDB yang disebabkan oleh berkurangnya daya beli masyarakat yang mengait lang-

sung kepada konsumsi masyarakat, anjaknya investasi baik PMA maupun PMDN (yang diakibatkan oleh tingginya suku bunga dan faktor-faktor lain seperti permasalahan perpajakan, kepabeanan, perburuhan, kepastian hukum, serta stabilitas politik dan keamanan), rendahnya belanja pemerintah, serta kecilnya skala ekspor kita, menyebabkan ruang untuk pergerakan dunia usaha menjadi terbatas.

Dari sisi lain, pihak swasta, terutama yang berskala besar —dan terutama yang terkait dengan kredit pinjaman dari perbankan serta yang tergantung pada faktor produksi yang diimpor sehingga transaksinya menggunakan nilai tukar dollar AS—segera terlibat dalam hutang yang sangat besar akibat terdepresiasi nilai tukar rupiah secara sangat tidak rasional. Inilah pukulan langsung ke sektor swasta yang mengakibatkan cukup banyak di antara mereka gulung tikar. Dampak turunannya menjadi amat banyak, baik karena faktor lesunya perekonomian nasional maupun kesulitan langsung yang dialami oleh pihak swasta itu sendiri. Kesulitan tersebut antara lain ialah sulitnya proses mengekspor komoditas oleh perusahaan eksportir, menciutnya ukuran pasar domestik, modal usaha yang tidak tersedia atau sulitnya mendapatkan kredit baru untuk usaha, masalah perburuhan, serta gangguan keamanan dan ketertiban publik yang sering berpengaruh pada aktivitas usaha.

Justru yang menarik dan patut kita jadikan pelajaran yang penting adalah tetap bertahannya sejumlah sektor usaha, di tengah lesunya dunia usaha. Sektor yang masih bertahan dan bahkan berkelanjutan adalah sektor pertanian secara luas, termasuk perikanan dan kehutanan. Sektor lainnya dengan pelaku ekonomi swasta yang juga mampu menjadi sandaran adalah usaha kecil dan menengah (UKM) dan pengusaha informal. Dalam sebuah wawancara pada medio 1998, mendiang Prof. Dr. Sumitro Djojohadikusumo “memuji” daya tahan masyarakat kita kendati digoncang oleh krisis sedahsyat itu. Begawan ekonomi Indonesia tersebut lebih lanjut mengatakan bahwa sebenarnya kalau menyimak indikator-indikator ekonomi mestinya Indonesia sudah parah betul. Tetapi, diakui, bahwa penyelamatnya adalah tetap berjalannya sektor-sektor informal yang justru tidak tergambar dalam statistik ekonomi kita, yang konon di Italia masa lalu disebut sebagai *grey economy*.

Sampai saat ini, sektor pertanian menyerap sekitar 44 persen dari tenaga kerja nasional dan UKM mempekerjakan sekitar 67 persen dari tenaga kerja sektor industri. Ini menyadarkan kita akan penting-

nya meletakkan sektor pertanian dan peran UKM secara proporsional dalam upaya pembangunan ekonomi nasional sehingga menjadi sektor yang lebih tahan akan guncangan dan berkembang secara adil. Artinya, disamping kedua sektor ini diupayakan agar tetap mampu menyerap banyak tenaga kerja dan membuka peluang berkompetisi secara sehat serta berkelanjutan di masa depan, peningkatan kualitas hidup para pelakunya harus diprioritaskan.

Bisnis dan Politik : Hubungan Yang Tidak Sehat

Secara jujur harus kita akui bahwa hubungan antara bisnis dan politik di masa lalu tidaklah dalam format yang sehat dan konstruktif. Hubungan antara kedua elemen itu bersifat simbiotik yang saling menguntungkan. Menguntungkan bagi kedua pihak itu, namun sama sekali tidak menguntungkan bagi negara dan rakyat.

Sebuah rezim politik yang berkuasa dalam kurun waktu yang panjang, dan terus bergulat untuk mempertahankan kekuasaan itu, tentu cenderung korup. Lord Acton mengatakan bahwa kekuasaan itu cenderung korup, dan kekuasaan yang absolut juga akan korup secara absolut (*Power tends to corrupt, absolute power corrupts absolutely*). Sementara itu pesan moral serupa juga telah disampaikan oleh John Steinback, “Kekuasaan itu sesungguhnya tidak korup, justru yang korup adalah rasa takut, yaitu takut kehilangan kekuasaan (*Power does not corrupt. Fear corrupts, perhaps the fear of loss of power*). Kedua pesan bijak itu amat relevan untuk memahami kesalahan masa lampau, dan untuk perbaikan di masa datang.

Untuk kepentingan mempertahankan kekuasaan —atau bagi sebagian lagi untuk mencapai kekuasaan—banyak (namun tidak semua) penguasa memanfaatkan hubungannya dengan para pengusaha. Penguasa mendapatkan sumber finansial yang diperlukan, dan untuk itu terjadi penyalahgunaan kekuasaan oleh para penguasa untuk memberikan berbagai kemudahan kepada pengusaha yang tidak sesuai dengan aturan hukum dan aturan main yang ada. Dalam praktiknya, absorpsi sumber-sumber finansial itu juga bermotifkan penumpukan kekayaan semata oleh para kroni.

Iklim yang terbangun secara nasional —sebagai akibatnya—adalah tumbuh dan berlangsungnya penggerogotan aset dan output nasional, sulitnya pemberantasan KKN, dan terus amannya praktek bisnis curang, seperti budaya pengelembungan biaya (*mark up*), monopoli, *predatory capitalism* dan lain-lain. Akibat ini semua, kaum

pengusaha profesional yang ingin berbisnis secara wajar dan menjunjung tinggi aturan hukum menjadi tersisih. Hubungan dan kerjasama usaha dengan pihak asing yang pada umumnya amat patuh pada *fair business practices* menjadi terhambat. Kecemburuan dan bahkan ketidaksukaan para pengusaha jujur kepada pengusaha curang menimbulkan ketegangan sosial tersendiri. Bahkan, di sisi lain, muncul persaingan non-bisnis yang tidak sehat antar sesama pengusaha.

Absennya Good Governance

Good governance yang sering diartikan sebagai tata laksana dan pemerintahan yang baik sebenarnya merupakan cermin dan manifestasi dari aturan hukum, aturan main, dan etika. Unsur yang menonjol adalah akuntabilitas dan transparansi. Semua pihak harus akuntabel, baik kepada konstitusi, undang-undang, dan tentunya aturan main yang berlaku. Yang dimaksudkan semua pihak adalah semua institusi negara termasuk pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat. Pada masa lalu, *good governance* ini tidak dipraktekkan secara memadai. Bahkan sekarangpun kita masih bergulat dan berjuang untuk terus membangun dan mengembangkan *good governance* ini dalam kehidupan bernegara, berpemerintahan dan bermasyarakat. Tatanan dan perangkat yang diperlukan untuk terciptanya *good-effective-governance* di tingkat pusat sampai di daerah senantiasa perlu dikembangkan. *Good governance* juga sangat penting dipraktekkan oleh kalangan bisnis melalui prinsip *good corporate governance*.

Tiadaanya praktek *good governance* bersamaan dengan lemahnya kontrol publik terhadap apa yang dilakukan oleh para penguasa dan para pejabat publik yang berlangsung pada periode itu, bukan hanya sering tidak efisien, tetapi juga sekaligus sarat dengan penyimpangan. Akumulasi dari itu semua adalah terjadinya ketidakadilan dan ketidakmerataan pembangunan, ketahanan nasional yang tidak kokoh, serta kegagalan bangsa dalam menciptakan dan memanfaatkan peluang yang tersedia, yang sesungguhnya akan lebih meningkatkan hasil pembangunan nasional yang dicapai.

Revitalisasi dan Rekonstruksi Ekonomi Indonesia : Agenda 2015

Ekonomi Indonesia Sebelum dan Sesudah Krisis

Terus terang, sebagai bangsa Indonesia kita amat bangga atas reputasi dan kinerja perekonomian Indonesia sebelum krisis. Mari kita renungkan: dalam jangka panjang Indonesia dapat mempertahankan laju pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi (7 persen per tahun) dan dengan stabilitas makroekonomi yang cukup kokoh. Bahkan bersama-sama dengan Thailand dan Malaysia, Indonesia saat itu mulai dikategorikan sebagai *The New Asian Tiger*. Betapa bangganya kita saat itu.

Pengakuan tersebut juga diberikan oleh Bank Dunia dalam buku yang dikeluarkannya pada bulan Mei 1997, beberapa bulan sebelum kita dihantam krisis, yang berjudul: “Indonesia, Sustaining High Growth with Equity”, dengan anak judulnya: “Macro-economic Development and Policies: Managing Success and Reducing Risk”. Dalam buku ini, Bank Dunia menulis :

“Berdasarkan berbagai indikator makro, perekonomian Indonesia belakangan ini menunjukkan kinerja yang sangat baik. PDB meningkat sebesar 7,8 persen dalam tahun 1996 dan tingkat inflasi turun menjadi 6,47 persen. Investasi langsung dalam dan luar negeri semakin marak, surplus fiskal yang cukup besar berhasil dipertahankan dan meskipun berbunga tinggi percepatan pembayaran hutang luar negeri pemerintah terus dilaksanakan. Cadangan devisa resmi naik sebesar USD 4 milyar selama 1996/ 1997”.

“Cuaca” tanah air yang terang benderang tersebut tiba-tiba berubah dengan cepat, mendung, kemudian hujan lebat dan gelap. Akhir tahun 1997 merupakan masa kelabu bagi Indonesia. Tahun itu merupakan sebuah goncangan yang sangat dahsyat dan sekaligus meru-

pakan sebuah diskontinuitas sejarah perekonomian yang sangat positif dan sangat menjanjikan. Dari pertumbuhan yang tinggi, langsung mengalami kontraksi dan jatuh pada keadaan depresi (-13 persen). Inflasi membumbung cepat mencapai 78 persen. Nilai tukar uang yang semula berkisar Rp. 2500,- per 1 dollar AS, pada puncaknya mencapai Rp. 17.000,- per 1 dollar AS. Dunia perbankan ambruk, hutang luar negeri naik tajam, pengangguran meningkat dan kemiskinan membengkak. Kehancuran ekonomi Indonesia ini dapat disamakan dengan kondisi ekonomi Amerika Serikat dan Inggris ketika kedua negara itu dan negara-negara lainnya mengalami The Great Depression awal tahun 1930-an.

Situasi perekonomian yang nyaris lumpuh inilah yang mewarnai tahun-tahun berat selanjutnya. Kini, kemunduran dan stagnasi ekonomi ini masih kita rasakan dan menyisakan berbagai permasalahan ekonomi yang sangat mendasar. Hutang dalam dan luar negeri pemerintah menjadi sekitar USD 130 milyar. Jumlah pencari kerja 9 juta orang, jumlah yang miskin dan relatif menganggur sekitar 42 juta orang. Kerusakan dan ketidak-tersediaan infrastruktur amat besar karena sangat terbatasnya anggaran dan kurangnya pemeliharaan infrastruktur yang sudah ada, ditambah kurangnya pembangunan infrastruktur baru. Investasi terus menurun dan kekuatan ekspor belum cukup kuat untuk meningkatkan output nasional kita. Akibatnya laju pertumbuhan ekonomi pasca krisis hingga saat ini hanya mampu dicapai pada kisaran 3–4 persen per tahun.

Meskipun pemerintah terus bergulat dalam upaya pemulihan dan rekonstruksi perekonomian, dengan capaian yang relatif baik, namun kejatuhan yang begitu dalam dan kehancuran yang begitu banyak, upaya-upaya besar dalam kurun waktu 5–6 tahun ini belum dapat mengembalikan perekonomian ke tingkat kinerja yang setara dengan sebelum krisis. Kita membutuhkan upaya-upaya yang lebih keras yang sistematisnya perlu dituangkan dalam suatu *grand strategy* yang dapat dipahami oleh semua pihak,³ untuk bisa menciptakan tatanan ekonomi yang lebih baik, lebih transparan, berkeadilan, dan lebih bertanggung-jawab.

3 Arahan untuk memformulasi *grand strategy* dimaksud beserta *grand politics* yang diperlukan untuk mewujudkannya saya uraikan pada bab 6.

Perlu Segera Keluar dari Krisis dan Membangun Kembali Ekonomi Indonesia

Krisis Nasional yang mencapai puncaknya tahun 1998 yang lalu dan yang ekornya masih kita rasakan hingga kini memang harus segera kita akhiri. Saya memahami bahwa tidak ada resep ajaib yang secara instan bisa menyudahi krisis ini. Tetapi, konsentrasi utama energi kita harus dapat kita arahkan pada agenda besar ini.

Mencermati kinerja ekonomi tahun 2002 dan memperkirakan capaian ekonomi tahun 2003 ini memang bangsa Indonesia belum merasa nyaman benar. Apalagi kalau capaian makroekonomi ini dituntut untuk dapat memecahkan masalah pengangguran, kemiskinan dan pembangunan infrastruktur. Namun, di tengah situasi nasional dan internasional yang serba tidak mudah, kita harus bersyukur dan memberi apresiasi kepada pihak-pihak yang secara gigih berupaya untuk meningkatkan keadaan ekonomi nasional, dan tentu terimakasih dan apresiasi kepada para petani, nelayan, dan pengusaha informal yang tetap gigih bertahan dengan segala kesabarannya di masa sulit ini.

Bahkan pada mereka yang terakhir ini, masyarakat secara luas layak memberikan apresiasinya karena pertanian, perikanan, dan usaha informal telah mampu memberikan sandaran melalui kemampuannya dalam menyerap tenaga kerja yang tinggi, menghidupkan perekonomian perdesaan dan aktifitas perekonomian informal, serta memasok pangan masyarakat secara terjangkau.

Mereka cukup tahan goncangan. Walau perbankan sedang ambruk, tetapi ekonomi mereka tetap berjalan bahkan masih memberikan pertumbuhan positif. Tanpa banyak kita perhatikan sebelumnya, mereka yang selama ini praktis tertelantarkan oleh kebijakan-kebijakan ekonomi yang dikembangkan ternyata memiliki suatu mekanisme yang disebut pasar uang lokal atau pasar uang komunitas dan sistem asuransi sosial atau sistem asuransi komunitas sehingga mereka masih mampu saling menopang di saat kondisi perekonomian sedang tidak baik.

Apresiasi ini haruslah termaknai secara baik dalam proses pengembangan kebijakan ekonomi ke depan. Artinya, oleh karena pentingnya sektor-sektor ini dalam penyerapan tenaga kerja dan dalam mengatasi kemiskinan, maka perhatian ekonomi ke depan harus memberikan perhatian yang luas dalam bentuk investasi yang terus meningkat, pengembangan infrastruktur (ekonomi dan sosial) per-

tanian dan perdesaan, pengembangan keterkaitan dengan industri dan jasa, provisi pelayanan sosial, pengembangan energi perdesaan, pengembangan lembaga-lembaga pendukung usaha perdesaan termasuk di dalamnya lembaga pendanaan serta lembaga inovasi dan diseminasi pertanian, dan tidak kalah pentingnya memajukan perempuan perdesaan baik melalui peningkatan akses ke pendidikan, politik, maupun usaha. Di samping itu, diperlukan pengelolaan pasar domestik yang semakin berkembang, di samping membangun jaringan perdagangan internasional, untuk produk barang dan jasa pertanian.

Hal ini penting tidak hanya karena mereka telah menjadi penyelamat masyarakat, bangsa, dan negara ini di masa krisis tetapi juga penting bagi perkembangan perkotaan dan industri. Stagnasi pertanian akan mencekik pertumbuhan perkotaan dan sektor-sektor ekonomi lainnya. Dukungan untuk membangun sektor pertanian dan mengangkat derajat pelaku ekonomi informal perlu diupayakan secara sistematis, serta dengan kuantitas dan kualitas usaha yang memadai. Dalam kaitannya dengan pembangunan sektor industri, campur tangan pemerintah yang bersifat distortif sedapat mungkin harus dihindari.

Lebih lanjut, yang juga penting selain dari upaya-upaya tersebut di atas adalah bangsa ini mengakui dan menyadari bahwa ekonomi kita belum pulih dan masih harus dipacu kebangkitan dan pertumbuhannya. Kita harus mengakui dan menyadari bahwa laju pertumbuhan masih relatif rendah, hutang kita besar, pemerintah memiliki keterbatasan dana untuk membiayai APBN, dan pembelanjaan pemerintah belum cukup memberikan stimulus untuk kebangkitan ekonomi, mengurangi pengangguran dan kemiskinan. Oleh karena itu, penataan dan stabilisasi ekonomi makro kita menjadi keharusan.

Pengakuan dan kesadaran bersama ini amat penting agar secara bersama pula kita dapat merumuskan kepentingan nasional kita untuk periode 5–10 tahun mendatang. Menyadari pula bahwa kehidupan nasional dan internasional ini terkait dengan banyak bidang yang saling berhubungan—katakanlah bidang politik, ekonomi, sosial, hukum dan HAM, dan keamanan, baik dalam konteks nasional, regional maupun internasional—maka sebagai bangsa yang bijak dan cerdas serta memiliki nasionalisme dan patriotisme sejati, tidak akan pernah mengorbankan salah satu kepentingan nasional yang utama.

Atas nama kepentingan nasional (rakyat dan bangsa ini), kita harus mempertahankan :

- eksistensi Indonesia sebagai negara nasional (*Nation State*),
- mempertahankan integrasi termasuk keutuhan wilayah, serta
- memulihkan dan membangun kembali Indonesia setelah jatuh dihantam krisis.

Kepentingan yang pertama dan kedua adalah faktor yang tidak dapat ditawar-tawar, bagaimanapun situasi yang kita hadapi. Adapun kepentingan ketiga merupakan faktor kontekstual yang menjadi sangat relevan pada situasi saat ini. Hal-hal inilah yang merupakan inti atau nilai dari agenda nasional yang sudah sering saya sampaikan di berbagai kesempatan—Pemulihan, Reformasi, dan Rekonsiliasi atau *Recovery, Reforms, dan Reconciliation (3R)*. Diskusi kita selanjutnya mengait langsung dengan kepentingan nasional ketiga di atas.

Membangun Dunia Usaha Yang Adil dan Konstruktif bagi Perekonomian Nasional

Dunia Usaha Yang Adil, Sehat dan Berkembang

Peran swasta dalam menggerakkan perekonomian nasional telah saya sampaikan sebelumnya. Tentu sekali lagi, swasta bukan hanya pemain tunggal dalam sebuah sistem ekonomi yang terbuka dewasa ini. Peran rumah tangga dalam penyediaan tenaga kerja, pembelanjaan barang dan jasa (konsumsi), pembelian saham perusahaan dan tabungan memiliki arti yang signifikan. Demikian pula pemerintah. Di samping fungsi pemerintah sebagai fasilitator, regulator, dan pembuat kebijakan, semisal kebijakan fiskal, pemerintah memiliki andil dalam tumbuh dan berkembangnya perekonomian nasional melalui pengembangan BUMN yang sehat serta pembangunan dan penyediaan infrastruktur seperti jalan raya, pelabuhan, pasar, listrik, air bersih, irigasi, dan telekomunikasi, yang tentunya amat diperlukan oleh swasta dan rumah tangga. Pelaku asing, termasuk perusahaan multinasional juga memiliki andil dalam investasi, perdagangan, asuransi, eksplorasi dan produksi tambang dan migas, pengembangan manufaktur dan bentuk-bentuk usaha lainnya.

Kesemua proses dan aktivitas ekonomi yang menyangkut dunia usaha tersebut memerlukan dibangunnya tatanan yang adil, sehat dan dapat menunjang bisnis untuk tumbuh dengan baik. Tatanan yang adil adalah apabila swasta mendapatkan ruang dan kemudahan yang memadai sehingga usahanya dapat tumbuh dengan baik, yang pada gilirannya memungkinkan perusahaan yang efisien untuk mendapat keuntungan yang baik (baca: besar). Keuntungan yang besar ini sangat penting pula artinya bagi negara karena dengan demikian pajak perusahaan dapat ditarik oleh negara dan hal ini juga penting bagi ma-

syarakat karena investasi dapat dilakukan, yang berarti berkembangnya lapangan kerja. Di sisi lain, adilnya dunia usaha juga mencakup terwujudnya perlakuan yang sama (tidak diskriminatif) dan pemberian peluang usaha yang sama pula.

Tatanan yang sehat tercipta apabila hubungan antara bisnis dan politik (utamanya antara swasta dan penguasa) berdasarkan pada kaidah-kaidah aturan hukum dan aturan-aturan formal lainnya yang mengikat dalam derajat transparansi dan akuntabilitas yang setinggi-tingginya. Tidak ada upeti dan kesepakatan gelap di antara keduanya, yang akan memboroskan dan menguras kekayaan negara yang seharusnya masuk dalam pajak dan kewajiban sosial lainnya.

Tumbuh dan berkembangnya dunia usaha tentu menjadi tujuan bersama yang utama. Mana mungkin investor mau menanamkan modalnya jika bidang usahanya tidak ada prospek, margin labanya sangat kecil, dan apalagi merugi. Hal-hal ini harus menjadi pemahaman bersama bagi semua *stakeholders*, apakah itu pemerintah pusat maupun daerah, pekerja, maupun masyarakat luas. Pungutan pajak yang berlebihan dan tidak adil, kebijakan perburuhan yang tidak tepat, tuntutan kontribusi sosial lainnya yang melebihi kapasitas perusahaan yang sifatnya non pajak, absennya insentif tertentu manakala swasta menghadapi persoalan finansial yang sangat serius atas situasi dan lokalitas usaha tertentu akan membuat usaha yang bersangkutan goyah dan kemungkinan besar ambruk. Jika ini terjadi semua pihak mengalami kerugian, baik perusahaan yang bersangkutan, pemerintah, pekerja, maupun masyarakat.

Upaya-upaya untuk menumbuhkan dan mengembangkan dunia usaha perlu didukung tidak hanya di Jakarta atau pulau Jawa, namun juga di daerah-daerah lainnya, khususnya wilayah potensial kita di Indonesia Timur. Upaya-upaya ini perlu direncanakan secara baik sehingga potensi bisnis di daerah, sesuai dengan keunggulan komparatif dan keunggulan kompetitifnya masing-masing dapat diwujudkan. Dalam tataran yang lebih luas, hal ini akan dapat mengurangi kesenjangan kesejahteraan ekonomi antar daerah.

Satu hal yang perlu diingat yaitu bahwa dalam menjalankan usaha, etika bisnis harus dijunjung setinggi-tingginya. Praktek bisnis curang harus dicegah dan dihentikan. Pekerja harus diperlakukan sebagai aset dan bukan beban. Semboyan “dengan modal sekecil-kecilnya, kita raup keuntungan sebesar-besarnya” yang sarat dengan nuansa *predatory capitalism* tidak cocok untuk diterapkan di negeri ini. Harus

ada etika dan rasionalitas yang bijak di kalangan swasta.

Ketika saya diminta oleh STIE, IPWI Jakarta untuk memberikan orasi ilmiah pada acara wisuda Program Pasca Sarjana, 29 Maret 1998 (waktu itu Presiden Soeharto masih memerintah), saya mengedepankan pemikiran yang saya beri judul “Membangun Dunia Usaha yang Adil, Berketahanan dan Berdaya-saing”. Dalam orasi ilmiah tersebut saya mengajukan paradigma dan langkah-langkah yang perlu ditempuh untuk mewujudkan dunia usaha yang adil, berketahanan dan berdaya-saing tersebut, dengan landasan pemikiran sebagai berikut :

- Usaha nasional akan sungguh adil jika kepentingan nasional tidak disubordinasikan kepada kepentingan asing, serta pemerintah dan bangsa sendirilah yang berdaulat dan paling dominan untuk mengatur dunia usahanya sendiri. Keadilan akan nampak mengemuka jika kemitraan dan keterkaitan antara usaha negara, usaha swasta dan koperasi serta antara usaha besar, usaha menengah dan usaha kecil, terjalin erat dan kokoh, baik secara struktural dan kultural, dengan tentunya keberpihakan lebih mengarah kepada usaha kecil dan si lemah.
- Usaha nasional dicirikan sebagai berketahanan tinggi dan tidak rentan serta tidak mudah tergoncang oleh faktor eksternal maupun internal. Di samping tentunya memiliki fundamental yang kuat serta potensi yang tinggi untuk tumbuh, usaha nasional kita juga harus mampu mengatasi krisis manakala badai menerjang.
- Sedangkan, pengertian berdaya-saing harus dipandang mampu tampil dan menang dalam persaingan regional dan global, serta sekaligus memiliki kapasitas untuk bersaing secara sehat di dalam negeri sendiri dalam bingkai kemitraan dan keterkaitan yang saling membantu, saling memperkuat dan saling menguntungkan. Indikator bahwa negara kita mampu bersaing di arena global adalah jika kita memiliki akses pasar yang kuat, terus mengembangkan produk dalam negeri yang berkualitas, relatif murah dengan *delivery system* yang tepat, serta iklim usaha yang sehat dan dinamis ditandai dengan kerangka hukum dan budaya yang kondusif untuk itu.

Saya berkeyakinan bahwa cara pandang demikian masih tetap relevan untuk kepentingan masa kini dan masa depan, menyangkut kebangkitan dan pembangunan kembali dunia usaha di Indonesia.

Dunia usaha kita yang terdiri dari usaha swasta, BUMN/BUMD,

dan koperasi ternyata berkembang secara kurang seimbang—koperasi pangasanya terhadap perekonomian kita terkecil. Pembangunan koperasi pada masa yang lalu telah dilakukan dengan cukup intensif; namun, karena pendekatannya yang tidak tepat menjadikan koperasi berkembang sebagaimana yang kita lihat saat ini. Koperasi yang ada sebagian besar terbentuk melalui pendekatan dari atas (*top-down*) dan dimaksudkan lebih untuk menjadi sarana bagi penerapan kebijakan ekonomi dan pembangunan. Pendekatan ini menjadikan koperasi hanya menjadi penyalur program-program pemerintah sehingga budaya usaha dan jiwa kewiraswastaan kurang berkembang. Akibatnya, tentu, koperasi-koperasi yang ada sulit untuk berkembang secara berkelanjutan; bahkan, banyak di antaranya yang terbentuk bersamaan dengan program pemerintah —misalnya penyaluran sarana produksi pertanian—dan berhenti beroperasi dengan berakhirnya program pemerintah tersebut.

Pembangunan koperasi di masa datang harus kembali pada jati dirinya, yaitu sebagai unit-unit usaha mandiri yang terbentuk oleh karena kebutuhan para anggotanya untuk bergabung dalam usaha bersama, berkoperasi. Tanpa kembali pada jati dirinya, koperasi akan sulit untuk berkembang. Pemerintah, dalam hal ini, lebih berperan sebagai fasilitator dan regulator bagi terciptanya arena bermain dan aturan hukum bisnis yang fair bagi koperasi; sehingga koperasi bisa tumbuh dan berkembang seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan badan usaha swasta dan badan usaha negara dengan menciptakan aturan main yang adil bagi mereka untuk memperoleh akses pada permodalan, teknologi, manajemen, perlindungan, dan pasar.

Pelaku bisnis yang dominan di Indonesia setelah swasta adalah BUMN/BUMD. Meskipun pemasukan yang dapat diperoleh negara dari BUMN dalam laba yang disetor kurang dari 1 persen dari PDB (data rata-rata sampai akhir tahun 2002) serta hanya sebesar 3,8 persen (tahun 2002) dari penerimaan negara, tetapi perannya dalam perekonomian secara umum masih sangat besar. Berbagai produk barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat dihasilkan oleh BUMN. Kebutuhan publik akan air bersih, listrik, bahan bakar, telekomunikasi, beberapa input dan produksi pertanian, layanan jasa angkutan publik, layanan jasa pengembangan sarana dan prasarana, layanan jasa logistik, layanan jasa kesehatan, dan layanan perbankan sebagian besar dipenuhi melalui BUMN. Sampai saat ini kita masih memiliki 162 BUMN terdaftar, dengan beberapa di antaranya telah diprivatisasi.

BUMN dengan demikian memiliki posisi yang strategis bagi peningkatan kesejahteraan rakyat. Namun demikian, dalam realitanya, seberapa jauh BUMN mampu menjadi alat negara untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan bangsa ini tergantung pada tingkat efisiensi dan kinerja umum dari BUMN yang bersangkutan. Apabila BUMN tidak mampu memproduksi dengan tingkat efisiensi yang mampu dilakukan oleh swasta, maka masyarakat akan menanggung biaya yang lebih tinggi. Adalah kenyataan, sayangnya, bahwa banyak BUMN kita yang mempunyai kinerja masih rendah, bahkan sebagian merugi secara terus menerus serta membebani anggaran negara.

Banyak pula dari masyarakat kita yang secara sinikal menyatakan bahwa banyak BUMN kita yang berteriak keras tatkala merugi tetapi diam saja bila memperoleh keuntungan guna memperoleh tambahan fasilitas dari pemerintah—baik itu dalam bentuk berbagai jenis subsidi, proteksi atau kebijakan yang preferensial. Saya tahu bahwa hal ini tidak unik untuk Indonesia tetapi juga terjadi di negara-negara lain. Tetapi, apakah kita akan terus dan tetap membangun perekonomian kita dengan cara seperti ini—di tengah kenyataan bahwa perusahaan-perusahaan swasta nasional maupun internasional sedang mereorientasikan dirinya dalam menghadapi persaingan bisnis yang semakin ketat, baik di pasar domestik maupun di pasar internasional?

Dengan kenyataan di atas, meskipun BUMN berstatus milik negara, dalam menjalankan usahanya, BUMN harus berlandaskan pada kaidah-kaidah bisnis yang umum. Dengan cara ini kita bisa membangun BUMN yang efisien seperti perusahaan penerbangan Singapura yang terkenal efisien atau perusahaan baja di Korea dan Taiwan yang juga terkenal sangat efisien.

Kita harus mampu membangun kesepakatan politik untuk memberikan ruang gerak yang leluasa bagi BUMN —seiring dengan berkembangnya usaha swasta dan usaha koperasi—untuk menjalankan bisnisnya secara baik. Dengan cara ini, BUMN akan menjadi bagian dari sumber-sumber kesejahteraan rakyat dan BUMN akan terbebas dari proses pencampuradukan antara fungsinya sebagai unit usaha yang dimiliki negara dengan kepentingan sesaat para penentu kebijakan—baik yang berada di eksekutif maupun yang berada di legislatif. Sudah menjadi rahasia umum bahwa banyak pembuat kebijakan di BUMN yang mendorong terjadinya proses ini, dan ini harus segera diakhiri.

Kesepakatan politik pertama yang harus dicapai dalam pembe-

nahan BUMN haruslah mengacu pada pasal 33 UUD 1945. Kita sebagai bangsa harus mampu bersepakat tentang cabang-cabang produksi dan aktivitas-aktivitas ekonomi yang harus dikuasai negara serta memberikan kemakmuran sebesar-besarnya bagi rakyat. Tanpa keputusan politik bersama tentang hal ini, maka kita akan terperangkap untuk memperdebatkan isu-isu yang acuan tentang baik dan buruknya belum kita rumuskan bersama, belum kita sepakati bersama. Akibatnya, pihak yang secara politik kuat akan menginterpretasikannya sesuai dengan kepentingannya, yang kemungkinan berbeda dengan nilai dan semangat yang dikandung konstitusi kita. Hal ini memiliki risiko bahwa pihak tersebut bisa jadi akan mengabaikan cita-cita memaksimalkan kemakmuran rakyat, serta berpotensi untuk dipermasalahkan secara hukum di kemudian hari.

Kesepakatan politik kedua, mengacu pada kesepakatan pertama, yaitu mengelompokkan ulang dan mengevaluasi kembali BUMN-BUMN yang kita miliki saat ini. Dengan acuan pasal 33 UUD 1945 dan kesepakatan politik pertama di atas, kita paling tidak bisa mengelompokkan BUMN-BUMN kita ke dalam: (a) kelompok BUMN yang telah tepat menangani cabang-cabang produksi atau aktivitas ekonomi sebagaimana dimaksud konstitusi, (b) BUMN yang menangani kegiatan privat tetapi bersifat strategis seperti kegiatan ekonomi yang menempati sistem ruang yang sangat luas dan/atau yang melibatkan tenaga kerja secara sangat intensif atau contoh-contoh lainnya, dan (c) BUMN yang masih menangani kegiatan ekonomi yang sifatnya privat (atau apa pun dasar atau kriteria pengelompokannya).

Dengan kesepakatan politik yang kedua tersebut, kita bisa memperoleh kelompok-kelompok BUMN sesuai dengan aturan main yang kita sepakati dalam kesepakatan politik pertama. Dengan kesepakatan politik kedua ini, kita perlu membangun kesepakatan politik ketiga, yaitu kelompok mana atau BUMN mana dari kelompok-kelompok yang telah disepakati tersebut yang harus dipertahankan serta mana yang harus diprivatisasi. Termasuk dalam hal ini adalah menentukan kesepakatan mengenai metoda privatisasi yang bagaimana selayaknya yang dilakukan, yang tentunya didasarkan atas ukuran kebaikan bersama, yaitu yang memberikan kemaslahatan tertinggi bagi segenap rakyat.

Kita juga masih perlu membangun kesepakatan politik yang keempat, yaitu apakah masih ada cabang produksi atau aktivitas ekonomi yang harus dikuasai negara —sebagai hasil kesepakatan politik

pertama—yang belum dikembangkan. Jika ada, apakah cabang produksi atau aktivitas ekonomi tersebut harus dikembangkan melalui kelembagaan BUMN.

Jika kita telah bersepakat dengan hal-hal di atas, maka kita perlu membangun kesepakatan politik tentang bagaimana BUMN dijalankan, dikelola, dan dilembagakan dalam sistem kelembagaan publik kita sehingga BUMN bisa memberikan kemakmuran sebesar-besarnya bagi rakyat dengan tetap memberikan ruang bergerak yang luas bagi usaha swasta dan usaha koperasi. Dan, keseluruhan kesepakatan ini harus dilembagakan dalam bentuk aturan perundangan-undangan yang menjamin siapapun yang bergerak dan/atau bertanggung jawab dalam mengelola BUMN sehingga menjadi akuntabel pada publik dan tidak terperangkap untuk melakukan langkah-langkah yang berdampak ekonomi-politik luas yang tidak diharapkan. Kesepakatan tersebut harus pula mampu menciptakan ruang yang leluasa bagi yang mengelola untuk memajukan BUMN-BUMN yang kita miliki, tanpa takut mengambil keputusan secara profesional akibat tidak adanya payung hukum untuk itu.

Dengan masih absennya kesepakatan politik dan belum memadainya aturan perundang-undangan yang memayunginya (walau kini DPR telah mengesahkan undang-undang tentang BUMN), saya harus menyatakan bahwa pengelolaan BUMN harus dikembalikan pada keempat tahapan proses kesepakatan politik di atas. Tanpa kesepakatan politik tersebut, kita akan kesulitan untuk membangun ukuran tentang perlunya BUMN, pengelolaan BUMN, dan pentingnya BUMN bagi kesejahteraan rakyat. Untuk itu, walau undang-undang tentang BUMN telah disahkan, saya tetap menganggap perlunya kita mengendalikan diri kita, untuk sementara waktu, dalam melakukan privatisasi sampai kesepakatan politik dimaksud di atas terbangun dan aturan-aturan operasional undang-undang yang baru disahkan telah terselesaikan berdasarkan kesepakatan politik dimaksud.

Kewajiban Pemerintah

Perihal peran pemerintah dalam perekonomian nasional, termasuk dalam dunia usaha, sering menjadi wacana debat. Isu yang diperdebatkan bukan lagi pada *free fight liberalism*, yang menurut madzhab klasik ataupun neo-klasik pemerintah ditabukan untuk mencampuri jalannya aktivitas ekonomi karena semua itu lebih efisien jika diberikan pada tangan tidak tampak (*the invisible hand*) dalam mekanisme pasar

dengan hukum-hukumnya sendiri. Isu tersebut juga bukan pada etatisme, di mana dalam sistem ekonomi komando semua aktivitas ekonomi didesain, direncanakan dan dikendalikan untuk keadilan dan kesejahteraan sosial yang setinggi-tingginya. Bukan juga pada aliran Keynesian yang meniscayakan pemerintah untuk melakukan campur tangan pada situasi tertentu sebab pasar diyakini tidak lagi sepenuhnya efektif untuk memecahkan persoalan ekonomi yang kritis, seperti ledakan pengangguran dan kemiskinan, serta runtuhnya sentra-sentra perekonomian sebuah negara (kegagalan pasar).

Pemerintah memiliki peranan yang penting dalam pembangunan. Namun permasalahannya bukanlah apakah: (a) pemerintah mengarahkan kebijakan makroekonomi; (b) menyediakan barang dan layanan publik; (c) bertanggung jawab untuk menyediakan *safety net*; dan (d) mengatur atau mengelola iklim usaha yang kompetitif. Hal ini karena pemerintah memang harus melakukan semua fungsi tersebut. Permasalahannya adalah bagaimana melengkapi pemerintah dengan kapasitas administratif yang memadai untuk dapat melakukan berbagai fungsi itu secara efisien.

Dalam konteks membangun dunia usaha yang adil dan konstruktif terhadap perekonomian nasional, yaitu terbangunnya kemakmuran bersama, apalagi dalam situasi transisi untuk keluar dari krisis seperti saat ini, pemerintah memiliki peran dan kewajiban yang menentukan. Atas nama negara, pemerintah paling bertanggungjawab dan berkewajiban untuk menciptakan tatanan dan membangun iklim perekonomian dan dunia usaha yang memungkinkan perekonomian nasional menghasilkan kemakmuran bersama yang berkeadilan. Peran dan kewajiban pemerintah yang diharapkan dapat saya kemukakan antara lain sebagai berikut :

- Pemerintah berkewajiban untuk menerapkan kebijakan ekonomi yang tepat, yang pada sisi fiskal menyangkut kebijakan yang bersifat distributif, *facilitating*, redistributif, dan regulatif, serta pada sisi moneter (bersama-sama dengan otoritas moneter) menyangkut kebijakan yang menstabilkan inflasi dan nilai tukar serta kebijakan regulatif untuk menyehatkan perbankan nasional.
- Pemerintah bersama masyarakat berkewajiban untuk membangun iklim nasional yang kondusif untuk aktivitas perekonomian dan dunia usaha, termasuk iklim investasi dalam bentuk :
 - Kebijakan perpajakan dan kepabeanan yang tepat.
 - Pengelolaan permasalahan perburuhan yang tepat.

- Terdapatnya kepastian hukum, termasuk penghormatan terhadap kontrak dan hak atas kekayaan intelektual, sehingga investasi serta upaya-upaya inovatif yang dilakukan pengusaha dan para penemu dapat dilindungi dengan baik.
- Peraturan daerah (dalam konteks desentralisasi dan otonomi daerah) yang tepat, tidak bertentangan dengan undang-undang dan kebijakan nasional, dan mendorong munculnya wiraswasta yang akan mengembangkan aktivitas ekonomi lokal.
- Jaminan keamanan yang memadai, dan stabilnya keadaan sosial politik di Tanah Air.
- Menciptakan aturan hukum dengan aturan main dan etika profesional sehingga hubungan bisnis dan politik (termasuk hubungan antara penguasa dan pengusaha) berada dalam suasana yang sehat, transparan, akuntabel dan tidak diskriminatif.
- Menciptakan peluang-peluang yang syah bagi dunia usaha melalui kebijakan fiskal (dalam bentuk penyediaan infrastruktur perekonomian) maupun maupun mendorong pembangunan sektor-sektor perekonomian seperti pertanian, industri pengolahan, pariwisata dan lain-lain, tidak hanya untuk menyediakan kesempatan kerja semata namun juga untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup.
- Pemerintah perlu menciptakan kondisi yang mampu mendorong perekonomian yang aktivitas-aktivitasnya bersifat ramah lingkungan. Berdasarkan analisis, debat politik, dan kajian degradasi lingkungan selama lebih dari dua dekade yang dilakukan di berbagai negara, telah disimpulkan bahwa tidak ada *trade off* antara pertumbuhan ekonomi dengan upaya pelestarian lingkungan. Saat ini, banyak negara berkembang yang harus menanggung biaya yang muncul karena telah mengabaikan pemeliharaan lingkungan. Oleh sebab itu, pemerintah perlu terus mendorong pembangunan yang berkelanjutan, terutama dengan memberikan kejelasan arah tentang apa yang harus dilakukan dan dengan cara bagaimana memperbaiki kerusakan lingkungan. Sepuluh tahun yang lalu mungkin masih bisa untuk mengabaikan isu lingkungan dan menutupinya dengan alasan mengejar pertumbuhan, stabilitas, ataupun pengentasan kemiskinan. Saat ini, dorongan internasional terhadap setiap negara agar memperhatikan lingkungan semakin kuat. Perusahaan-perusahaan yang mengabaikan masalah lingkungan

juga akan menghadapi kesulitan di pasar internasional.

- Seiring dengan rekomendasi komunitas internasional, saya juga menekankan perlunya kita untuk terus memperkuat *good governance* di negeri ini, dengan mengurangi birokrasi dan urusan formal yang bertele-tele, mulai dari persetujuan investasi sampai ke administrasi perpajakan dan bea cukai. Peraturan-peraturan yang membebani masyarakat dan kalangan bisnis tanpa alasan yang kuat dan membuka peluang untuk melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme semuanya harus dihentikan.

Kewajiban Swasta

Setelah pemerintah melaksanakan peran dan kewajibannya untuk menciptakan tatanan dan iklim dunia usaha yang adil dan sehat, dan setelah pemerintah berupaya untuk menciptakan peluang-peluang baru bagi para pengusaha, kalangan swasta harus aktif, bahkan proaktif, untuk mencari dan memanfaatkan peluang tersebut sebaik-baiknya. Bagi pengusaha yang sangat kreatif dan inovatif, peluang itu umumnya dapat mereka ciptakan sendiri.

Di masa lalu, ada sejumlah kemudahan yang amat gampang diperoleh oleh para pengusaha, terutama oleh para kroni maupun yang dekat dengan kekuasaan, sehingga mereka cenderung menjadi manja. Mental yang tangguh, kegigihan dan profesionalitas sebagai pengusaha tidak banyak dimiliki oleh kelompok pengusaha seperti itu, sehingga ketika situasi perekonomian dan dunia usaha berubah secara dramatis, mereka tidak mampu bertahan.

Banyak juga pengusaha yang menggantungkan usahanya pada proyek-proyek yang diberikan oleh pemerintah, yang lazimnya berkaitan dengan belanja pembangunan yang tertuang dalam APBN maupun APBD. Kultur seperti ini tidak memberikan kesadaran dan tantangan bahwa masih banyak cabang usaha di luar proyek pemerintah yang justru cukup prospektif. Untuk memberikan gambaran, tahun 2003 ini PDB nasional diperkirakan mencapai Rp. 1.940 triliun. Pengeluaran pemerintah (APBN) berjumlah Rp. 354.1 triliun, atau hanya sekitar 18 persen dari PDB. Tentunya masih tersedia ruang dan peluang yang lebih luas bagi pengusaha, dibanding apa yang dapat disediakan oleh pemerintah melalui kebijakan fiskalnya.

Agar dunia usaha segera dapat pulih dan bangkit kembali, pada sisi swasta perlulah berperan dan melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

- Selalu berupaya mencari dan menemukan peluang berusaha; dan, bila mungkin menciptakan peluang sendiri.
- Melaksanakan praktek bisnis yang baik (*good corporate governance*), dengan menghindari praktek-praktek bisnis yang curang.
- Menegakkan etika bisnis, yang mungkin dapat diterjemahkan sebagai beroperasi secara gigih mencari keuntungan dalam koridor persaingan usaha yang sehat, membayar pajak sesuai dengan aturan perpajakan yang berlaku, dan bersama masyarakat membangun serta mengakumulasikan kapital baik melalui pengembangan sumberdaya manusia maupun melalui pengembangan masyarakat (*community development*).
- Mencari terobosan usaha, memanfaatkan peluang bisnis yang ada, dan mengembangkan peluang-peluang bisnis lain sehingga penyerapan tenaga kerja terus meningkat, yang berarti memberikan kontribusi pada perekonomian nasional dalam penciptaan lapangan kerja dan penciptaan nilai tambah.
- Bagi yang bergerak di bidang produksi barang dan jasa, swasta berkewajiban untuk terus-menerus meningkatkan kualitas usaha dan kinerjanya menuju tercapainya proses produksi yang efisien dan dengan produktivitas yang tinggi. Perusahaan harus terus berupaya agar produk barang dan jasanya menjadi lebih baik, lebih cepat dan lebih murah. Jika seluruh cabang usaha ini makin produktif, maka produktifitas nasional (lebih tepatnya *total factor productivity*, TFP) juga akan terus meningkat. Kita disadarkan bahwa salah satu penyebab ambruknya perekonomian Indonesia ketika dilanda krisis tahun 1997 adalah karena pertumbuhan cepat ekonomi Indonesia lebih didorong oleh input-input (sebab modal finansial cukup melimpah dan tenaga kerja relatif murah), dan bukan didorong oleh pertumbuhan TFP yang erat kaitannya dengan peningkatan keterampilan/pengetahuan tenaga kerja, teknologi, dan kemampuan manajerial yang baik. Dalam periode 1970-1996, suatu analisis menemukan bahwa pertumbuhan TFP Indonesia hanya 0,7 persen per tahun, jauh lebih rendah dibandingkan Malaysia (2,0 persen) dan Korea Selatan (3,1 persen). Itulah sebabnya ketika terjadi kepanikan dan pelarian modal ke luar negeri, runtuhlah sendi-sendi perekonomian dan dunia usaha kita.
- Dunia usaha perlu menjadikan inovasi sebagai motor utamanya. Dalam inovasi ini telah terkandung pengertian penerapan metode

produksi yang lebih efisien, penemuan produk baru yang lebih berkualitas, penemuan sumber pasokan baru, perluasan pasar, serta penerapan organisasi industri yang lebih baik. Dengan inovasi, sifat *diminishing return*, yaitu semakin berkurangnya tambahan produktivitas yang diperoleh perusahaan dengan bertambah besarnya skala usaha yang dijalankan, dapat dicegah.

Hubungan Negara, Pasar, dan Masyarakat

Menurut UNDP ada tiga institusi makro yang dapat berfungsi sebagai pilar kehidupan nasional yang modern, yaitu Negara, Pasar dan Masyarakat. Ketiga institusi penting ini kerap dinamakan Troika. Disamping secara individual masing-masing institusi itu harus baik, hubungan ketiganya juga harus sehat dan harmonis. Institusi negara, termasuk pemerintah, harus bersih, responsif dan akuntabel. Institusi masyarakat harus mencerminkan karakter *good civil society* yang penuh kesadaran dan tanggung jawab untuk mewujudkan kehidupan demokrasi dan kepentingan bersama (*the common good*). Sementara itu, institusi bisnis yang merepresentasikan pasar juga harus memiliki nilai dan praksis kehidupan usaha yang bertanggung-jawab.

Kemitraan elemen troika ini amat penting di dalam pengambilan keputusan kenegaraan yang fundamental, dan kemudian dalam perumusan dan pengembangan kebijakan publik. Jika hubungan ketiga institusi itu sehat, transparan dan penuh kebertanggung-jawaban, maka jarak antara mereka menjadi semakin kecil, dan solusi yang dipilih untuk memecahkan permasalahan nasional juga lebih kredibel. Sebagaimana kita pahami bersama bahwa cita-cita dan tujuan negara yang utama adalah penciptaan kemakmuran bersama yang berkeadilan. Oleh karena itu bangsa yang bersangkutan harus pandai mengembangkan *macro-policy* dan *grand strategy* dengan mendayagunakan potensi nasional yang tersedia, yaitu sumber daya alam (*natural capital*), infrastruktur fisik (*physical capital*), sumber daya manusia (*human capital*), dan masyarakat yang bersatu dan berkarya (*social capital*), menuju terbentuknya kondisi kehidupan bangsa yang dicirikan dengan terbentuk dan mapannya masyarakat secara baik, ekonomi yang baik, politik yang baik, serta lingkungan hidup yang baik pula.

Elemen penting dari pasar, di samping perusahaan, adalah rumah tangga. Kontribusi utama rumah tangga di pasar adalah sebagai pemasok tenaga kerja dan juga sebagai pengguna produk akhir (konsumen). Dengan demikian, ada keterkaitan yang erat antara kesejahteraan

an rumah tangga dengan pertumbuhan bisnis. Bisnis yang tumbuh dan berkembang memberikan pengaruh yang baik bagi perluasan kesempatan kerja. Agar perluasan kesempatan kerja ini mampu menaikkan kesejahteraan rumah tangga, maka tenaga kerja perlu memperoleh surplus yang memadai dari pertumbuhan bisnis atau ekonomi tersebut. Peranan pemerintah dalam hal ini adalah menjamin bahwa pasar tenaga kerja dapat berjalan dengan baik dan adil tanpa mengabaikan aspek efisiensi. Karena, sama halnya dengan pasar produk, pasar tenaga kerja perlu bersifat kompetitif dan terhindar dari praktek-praktek yang bersifat monopsonistik. Tenaga kerja yang merasa diperlakukan secara baik dan adil merupakan aset perusahaan yang utama yang mampu menopang keberlanjutan usaha.

Pada masa lalu dan masih berlangsung sampai kini, Indonesia menyadari keunggulan kompetitifnya adalah pada tenaga kerja yang murah. Dalam jangka panjang, keunggulan kompetitif tidak dapat disandarkan pada tenaga kerja yang murah. Penyandaran seperti itu merupakan suatu keadaan yang asimetrik di mana “manfaat” dinikmati oleh perusahaan dengan pembayaran yang menyulitkan tenaga kerja untuk meningkatkan kualitas hidupnya secara lebih memadai. Di samping itu, perusahaan-perusahaan multinasional yang bersifat *“foot-loose industry”* akan dengan mudah berpindah dari Indonesia menuju ke negara lain yang upah tenaganya lebih murah. Untuk mencapai keunggulan kompetitif dari aspek ketenagakerjaan, pemerintah perlu melakukan upaya-upaya yang konsisten dan terus menerus untuk meningkatkan kualitas sumberdaya. Peranan dan fungsi pendidikan (yang mencakup aspek intelektual, moral, budaya, dan keterampilan) perlu terus ditingkatkan kuantitas dan kualitasnya, sehingga daya saing yang dimiliki Indonesia dari aspek sumberdaya alam dapat ditunjang sepenuhnya oleh daya saing di bidang sumberdaya manusia dan teknologi.

Untuk itu, pemerintah perlu terus meningkatkan pendidikan, tidak hanya karena keharusan konstitusi ataupun peningkatan daya saing semata, tetapi karena pendidikan merupakan proses pembebasan dan proses pembangkitan kesadaran. Pendidikan mampu membebaskan manusia dari belenggu ketidaktahuan, belenggu kemiskinan, belenggu ketergantungan, dan belenggu kegagalan dalam menyongsong masa depan yang terus berubah. Pendidikan yang terus berkembang dan menjadi gerakan masal inilah yang banyak menentukan produktivitas masyarakat di negara-negara Asia Timur. Amartya K.

Sen (2001), seorang pemenang hadiah Nobel ekonomi lainnya, dalam tulisannya *What is Development About?*, menyatakan bahwa :

“Public education has been an effective means of freeing people from the bondage of illiteracy and ignorance. This freedom is valuable in itself, but it also contributes to economic development...and to the effective freedoms that result from economic prosperity. The great achievements of the East Asian and Southeast Asian economies over the past few decades are also closely related to the interactive impact of their early education expansion and its far-reaching consequences. Basic education, in particular female education, is associated with many social changes, in particular the reduction of child mortality and rapid fall in fertility rates. The latter is, in fact, an important test case of the role of freedom.”

(Pendidikan umum merupakan suatu mekanisme yang efektif untuk membebaskan manusia dari belenggu ketidaktahuan dan ketidakpedulian. Pembebasan tidak hanya bermanfaat bagi kebebasan itu sendiri tetapi juga mampu memberikan sumbangan yang nyata bagi pembangunan ekonomi ... dan mampu pula memberikan sumbangan atas terbangunannya kebebasan efektif yang lahir dari kesejahteraan ekonomi yang didapatkan. Keberhasilan (pembangunan) dari negara-negara Asia Timur dan Asia Tenggara dalam beberapa dekade terakhir terutama lahir dari hasil interaksi antara dampak pendidikan umum dengan konsekuensi lanjutan dari pendidikan itu sendiri. Pendidikan dasar, khususnya bagi kaum perempuan, berkait erat dengan berbagai proses perubahan sosial, khususnya menurunnya kematian bayi dan tajamnya penurunan laju kelahiran. Yang terakhir ini sesungguhnya merupakan uji kasus atas peran dari kebebasan”)⁴

Kembali ke hubungan interdependensi antar elemen-elemen Troika dalam kaitan penciptaan iklim perekonomian dan dunia usaha yang baik, maka tipologi dan karakter hubungan antar elemen troika, utamanya hubungan antara negara dan pasar dapat dikedepankan sebagai berikut :

4 Terjemahan bebas penulis atas sitiran di atas.

- Terwujudnya penghormatan terhadap prinsip-prinsip ekonomi pasar dan demokrasi.
- Namun, penghormatan terhadap kaidah ekonomi pasar tidak boleh meminggirkan rasa keadilan dan keberpihakan kepada yang lemah dan tidak berdaya.
- Penghormatan terhadap nilai dan praktek demokrasi tidak boleh mengenyampingkan perlunya berorientasi kepada kebaikan bersama (*the common good*) dan proses kesejarahan bangsa.
- Hubungan bisnis dan politik yang sangat kolusif dalam sebuah ekstrim, dan pemisahan tajam di antara keduanya dalam ekstrim yang lain, bukanlah pilihan yang tepat. Hubungan keduanya kecuali harus sehat dan harmonis, juga harus bertumpu pada aturan hukum yang berlaku.
- Troika harus memiliki komitmen, kejujuran dan kemudian melakukan aksi bersama untuk menyelamatkan dan membangun kembali negeri ini, dengan cara memecahkan berbagai permasalahan kritis dan mendasar di segala bidang kehidupan bangsa. Di bidang ekonomi upaya dan langkah besar harus diarahkan untuk mengatasi masalah pengangguran dan kemiskinan, membangun kembali infrastruktur, meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan, meningkatkan investasi di dalam negeri, meningkatkan nilai ekspor, meningkatkan daya beli masyarakat, memerangi KKN, memperkecil ketimpangan kesejahteraan antar daerah, meningkatkan produktifitas, dan lain-lain upaya yang penting.

Saya sependapat dengan apa yang disebut sebagai “A Challenge for Indonesia” yang disampaikan oleh Richard Robison dalam tulisannya yang berjudul *Indonesia: Crisis, Oligarchy, and Reform*, yang berbunyi :

“Will the power and influence of politicians, tycoons, and officials be subordinate so a rule of law and the authority of the courts, or will money politics and the authority of political bosses appropriate parliament and government?”

(“Akankah kekuasaan dan pengaruh para politisi, konglomerat, dan pejabat disubordinasikan pada aturan hukum dan kewenangan peradilan, atau akankah politik uang dan kekuasaan para elit politik yang mengarahkan parlemen dan

pemerintah?”)⁵

Oleh karena itu, pola hubungan interdependensi antar elemen Troika yang tepat akan menjadi prasyarat penting dalam membangun kembali perekonomian kita. Stiglitz (2002) dalam buku terbarunya, *Globalization and Its Discontents*, menyatakan bahwa falsafah dan kebijakan ekonomi yang baik haruslah memandang :

“...the relationship between government and market as complementary, both working in partnership, and recognized that while markets were at the center of the economy, there was an important...role for government to play. I had studied the failures of both markets and government, and was not so naïve as to think that government could remedy every market failure. Neither was I so foolish as to believe that markets by themselves solved every societal problem. Inequality, unemployment and pollution : these were all issues in which government had to take an important role”

(“...hubungan antara pemerintah dan pasar bersifat saling melengkapi—keduanya bergerak dalam kemitraan—dengan menyadari bahwa dalam konteks ekonomi meski pasar merupakan bagian yang utama tetapi pemerintah juga memiliki peranan penting yang harus dijalankan. Saya telah mempelajari kegagalan-kegagalan pasar maupun kegagalan-kegagalan pemerintah. Saya tidak terlalu naif untuk berpikir bahwa pemerintah dapat mengatasi segala jenis kegagalan pasar; pun, saya tidak terlalu bodoh untuk mempercayai bahwa pasar dengan sendirinya mampu mengatasi persoalan-persoalan sosial. Ketimpangan atau kesenjangan, pengangguran, dan problem lingkungan (polusi) merupakan isu-isu penting di mana pemerintah harus mengambil peranan utama”)⁶

Dukungan Politik yang Positif

Bulan Februari 2003 yang lalu di Denpasar, di depan seminar yang diselenggarakan oleh HIPMI saya mengedepankan perlunya konsensus baru dan dukungan politik terhadap pilihan, keputusan dan kebijakan yang dilakukan oleh negara, khususnya pemerintah, untuk mengatasi berbagai permasalahan nasional. Waktu itu saya berikan

5 dan 6 Terjemahan bebas penulis atas sitiran di atas.

contoh konsensus seperti apa yang perlu kita bangun. Misalnya jika MPR telah mengamanahkan bahwa bangsa ini harus melakukan rekonsiliasi, maka perlu disusun kesepakatan bersama tentang apa yang perlu kita tetapkan, sebelum pemerintah menyusun dan melaksanakan langkah-langkah operasionalnya. Di bidang ekonomi kita harus bersepakat menentukan pilihan dan kebijakan dasar kita setelah Indonesia mengakhiri kontraknya dengan program IMF Kesepakatan itu harus bertumpu pada pemahaman yang lengkap akan konsekuensi dan harga yang harus dibayar dalam upaya pemulihan dan pembangunan kembali ekonomi pasca IMF. Dengan konsensus ini, pemerintah akan memiliki kekuatan moral dan dukungan politik yang memadai untuk menyiapkan alternatif pengganti dan rencana aksi (*action plan*) lainnya dengan tetap menjaga hubungan internasional kita secara baik.

Dalam kaitannya dengan hubungan ekonomi politik internasional yang berkembang saat ini, kita harus mampu meletakkan diri kita sebagai bagian dari komunitas internasional dan/atau komunitas global. Sebagaimana layaknya suatu komunitas, kita harus pula mengikuti aturan main bersama sehingga kita bisa hidup bersama secara baik. Aturan main bersama ini seharusnya fair dan adil dengan memperhatikan secara khusus yang miskin dengan tanpa harus mengorbankan mereka yang telah berkembang, suatu pola hubungan internasional yang bercirikan keadilan sosial. Aturan main bersama ini harus lahir melalui proses demokrasi di mana setiap tahapan prosesnya mampu mencerminkan dan merespon kepentingan mereka yang terpengaruh oleh kebijakan dan aturan main bersama tersebut.

Terus terang, dalam alam transisi menuju demokrasi ini, karakter perpolitikan kita sering tidak adil dan kurang melakukan pembelaan politik yang benar. Amat sering terjadi manipulasi isu yang sebenarnya tidak mencerdaskan kehidupan masyarakat kita. Melawan kebijakan pemerintah (sesungguhnya melawan tokoh-tokoh politik yang berada dalam jajaran pemerintahan) tidak dilakukan dengan cara mengkritisi keputusan dan kebijakan pemerintah yang bertumpu pada logika dan akal sehat (*common sense*), tetapi menggunakan retorika yang amat populis dengan tujuan membangkitkan kebencian masyarakat terhadap pemerintah agar kredibilitas pemerintah runtuh. Contoh yang gamblang adalah ketika pemerintah menaikkan harga BBM, TDL dan tarif telepon pada Januari 2003 yang lalu. Sebenarnya ruang demokrasi terbuka lebar untuk mengkritisi dan menolak ke-

naikan harga/tarif ketiga komoditas tersebut dengan cara yang edukatif. Katakanlah kenaikan itu akan memicu kenaikan harga barang-barang lain karena dilaksanakan serentak, sehingga beban yang dipikul oleh rumah tangga dan perusahaan menjadi terlampau berat, dan kompensasi yang diberikan kepada kaum miskin dan golongan ekonomi lemah kurang memadai, dan mungkin alasan-alasan lain yang dapat didialogkan dengan pengambil keputusan dan perumus kebijakan. Jika dengan cara ini akhirnya pemerintah merevisi kebijakannya, maka telah terjadi proses pembelajaran demokrasi yang baik dan tidak menimbulkan “*moral damage*” pada pihak manapun. Tetapi jika penolakan itu dibangun dengan teriakan “pemerintah menindas rakyatnya, pemerintah tidak berperikemanusiaan, dan membikin rakyat sekarat” dan karenanya kebijakan itu harus ditolak dan dibatalkan, maka situasinya menjadi lain. Unjuk rasa berskala besar untuk menolak kebijakan pemerintah dengan alasan pertama yang bertumpu pada logika merupakan wujud kontrol masyarakat terhadap kebijakan publik, dan karenanya bersifat sehat. Namun, unjuk rasa yang sama dengan teriakan yang “*misleading*” tersebut bisa menjadi preseden yang buruk bagi pembuatan kebijakan publik yang akan datang. Negeri kita akan bernasib “sial” jika makin banyak politisi yang bersikap “*irresponsible*”.

Contoh di atas sesungguhnya menyiratkan sebuah karakter dan kultur perpolitikan di negara kita dewasa ini, yang menurut pendapat saya tidak sehat. Adalah benar bahwa politik itu selalu berkaitan dengan kekuasaan. Semua akal, siasat dan cara pada hakikatnya dapat digunakan untuk meraih kekuasaan tersebut, ataupun untuk mempertahankan kekuasaan yang telah dimiliki. Namun, menurut saya selalu ada ruang untuk moral dan etika. Berpolitik selalu memerlukan ukuran yang ditarik dari teori kepatantasan, dan sekaligus memiliki dimensi pendidikan.

Prospek Ekonomi ke Depan : Penciptaan Peluang

Prospek Perekonomian Indonesia

Guna memudahkan pemahaman kita terhadap kondisi dan prospek ekonomi jangka pendek ke depan, berikut ini akan saya kedepankan kinerja perekonomian tahun 2002 yang lalu, dan perkiraan perekonomian tahun 2003 yang sedang berjalan ini.

Kinerja pemulihan ekonomi tahun 2002 mencatat beberapa capaian yang signifikan, meskipun terdapat pula hal-hal yang belum menggembirakan. Stabilitas moneter memiliki kemajuan yang cukup berarti. Hal ini ditinjau dari pergerakan nilai tukar dan suku bunga. Nilai tukar rupiah terhadap USD terapresiasi dari sekitar Rp. 10.200 di tahun 2001 menjadi sekitar Rp. 8.900 di tahun 2002. Demikian pula suku bunga SBI – 1 bulan menurun dari 17,6 persen (2001) menjadi 12,9 persen (2002). Dirasakan bahwa membaiknya stabilitas politik dan keamanan turut mendorong terbangunnya stabilitas moneter ini.

Kendati demikian, kemajuan sektor riil dirasakan masih rendah. Lambatnya pemulihan ekonomi dunia amat berpengaruh terhadap kinerja ekonomi Indonesia. Nilai ekspor juga mengalami penurunan sebesar 0,4 persen. Hal lain yang cukup signifikan adalah turunnya nilai persetujuan PMA dan PMDN. Tahun 2002 proyek PMDN hanya berjumlah 181 dengan nilai persetujuan Rp. 25,3 triliun, turun dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya dengan jumlah 264 dan nilai persetujuan sekitar Rp. 58,8 triliun. Sedangkan proyek PMA yang pada tahun 2002 berjumlah 1.135 dengan nilai persetujuan sekitar USD 9,7 milyar, lebih rendah dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang berjumlah 1.333 dengan nilai persetujuan USD 15,1 milyar.

Laju pertumbuhan ekonomi tahun 2002 sebesar 3,7 persen,

sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan laju pertumbuhan ekonomi tahun sebelumnya (3,5 persen). Namun perlu diketahui bahwa peningkatan PDB ini terutama didorong oleh pengeluaran konsumsi rumah tangga dan pemerintah yang masing-masing naik sebesar 4,7 persen dan 12,8 persen. Sebaliknya investasi fisik (dengan proksi pembentukan modal tetap bruto, PMTB) dan ekspor turun masing-masing sebesar $-0,2$ persen dan $-1,2$ persen. Sementara dari sisi produksi, yang tumbuh secara signifikan adalah sektor pengangkutan dan komunikasi (7,8 persen), sektor listrik, gas dan air bersih (6,2 persen), dan sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan (5,6 persen). Sektor-sektor lainnya mengalami pertumbuhan yang positif namun relatif lebih kecil.

Bagaimana prospek perekonomian kita tahun 2003 ini? Ada sejumlah asumsi yang berimplikasi positif terhadap sistem perekonomian dalam negeri, namun derajat ketidakpastian yang dihadapi perekonomian kita juga masih tinggi. Ketidakpastian terkini yang kemungkinan berdampak negatif terhadap perekonomian Indonesia tahun 2003 ialah perang di Irak dan kekhawatiran akan wabah SARS (severe acute respiratory syndrome). Dampak negatif wabah SARS secara nyata telah terjadi di beberapa negara tetangga. Terhadap perekonomian Indonesia, wabah tersebut berdampak tidak langsung, terutama berupa penurunan kunjungan wisatawan manca negara. Namun, mengingat pangsa sektor pariwisata terhadap PDB hanya sekitar 3,9 persen, maka dampak wabah tersebut terhadap pertumbuhan ekonomi nasional diperkirakan kurang signifikan.

Tidak seperti yang dikhawatirkan oleh berbagai kalangan sebelumnya, ternyata perang di Irak tidak berlangsung lama, sehingga diharapkan tidak menyebabkan timbulnya resesi baru pada perekonomian global. Dengan demikian, diperkirakan ekonomi dunia terus pulih meskipun lambat. Amerika Serikat dan Jepang sebagai tujuan ekspor Indonesia terbesar diperkirakan juga akan tumbuh secara lambat. Oleh sebab itu, cara yang paling tepat dalam menghadapi berbagai ketidakpastian situasi global pasca Perang Irak adalah dengan upaya peningkatan permintaan dalam negeri, yaitu dengan menjaga stabilitas konsumsi rumahtangga, mendorong peningkatan investasi domestik, dan ekspansi fiskal terbatas. Kita pahami ketiga komponen permintaan itu memiliki problematikanya masing-masing. Namun demikian, dalam kondisi dengan ketidakpastian yang masih cukup tinggi serta lambatnya pertumbuhan ekonomi dunia seperti saat ini

(sehingga masih relatif sukar untuk menemukan dan mengembangkan sumber-sumber pertumbuhan baru), maka dalam jangka pendek, kita perlu memfokuskan perhatian pada ketiga komponen permintaan tersebut. Tumpuan yang cukup besar pada konsumsi rumahtangga berimplikasi pada pentingnya menjaga kestabilan tingkat konsumsi, misalnya dengan memperkecil fluktuasi suku bunga dan inflasi.

Dalam kaitannya dengan investasi domestik, peningkatan komponen permintaan ini untuk tahun 2003 cukup memungkinkan untuk terjadi karena mulai pulihnya kepercayaan dunia usaha, mulai pulihnya peranan intermediasi perbankan, dan kemajuan yang dicapai dalam restrukturisasi hutang swasta. Kredit domestik terhadap sektor swasta, yang pada tahun 2002 hanya mencapai sekitar 20 persen dari PDB, diperkirakan akan meningkat mengingat kecenderungan penurunan suku bunga pinjaman, mengikuti trend penurunan suku bunga SBI. Perkiraan akan meningkatnya investasi domestik, stabilnya permintaan rumahtangga terhadap produk akhir (stabilnya tingkat konsumsi), serta ekspektasi positif akan stabilnya kondisi sosial-politik diharapkan akan dapat mendukung pulihnya sektor industri pengolahan non-migas. Artinya, diperkirakan bahwa sisi penawaran dari perekonomian kita akan bertumbuh walaupun dalam besaran yang masih terbatas.

Dalam hubungannya dengan ekspansi fiskal, hal ini memang diperlukan guna memberikan stimulus kepada perekonomian, namun harus senantiasa memperhatikan dimensi keberlanjutannya (*fiscal sustainability*). Di samping itu, upaya untuk mencapai konsolidasi fiskal (yaitu terciptanya struktur APBN yang sehat), dengan tetap mengupayakan pemberian stimulus fiskal dalam batas-batas kemampuan negara untuk mendukung proses pemulihan ekonomi, perlu dilaksanakan secara terencana. Dalam tahun anggaran 2003 defisit anggaran diperkirakan sebesar Rp 34,4 triliun atau sekitar 1,8 persen dari PDB, lebih rendah dibanding defisit anggaran pada APBN tahun sebelumnya yaitu sekitar 2,5 persen dari PDB. Dengan menurunnya defisit anggaran, beban otoritas moneter dalam mengendalikan uang beredar akan berkurang, sehingga lebih memudahkan upaya untuk mengendalikan inflasi. Pada dasarnya, stabilitas makroekonomi memang memerlukan kebijakan fiskal dan moneter yang berhati-hati dan terkoordinasi.

Kembali ke sektor fiskal, perhatian kita pada keberlanjutan fiskal berkait erat dengan persoalan hutang yang kita miliki saat ini. Telah

dikemukakan bahwa relatif lesunya perekonomian Indonesia setelah terjadinya krisis tahun 1997 membawa kita pada suatu keadaan di mana pengeluaran (belanja) pemerintah merupakan tumpuan penting guna menstimulir pergerakan roda perekonomian. Kebijakan pemerintah dalam bentuk ekspansi fiskal tersebut menyebabkan pemerintah menjalankan kebijakan *budget deficit* (defisit anggaran). Untuk mendanai defisit anggaran, pemerintah menerbitkan obligasi (surat utang), di samping melakukan pinjaman luar negeri. Akibat dari kebijakan tersebut, maka pinjaman (hutang) pemerintah, baik yang bersumber dari dalam negeri maupun dari luar negeri, melonjak tinggi. Pada tahun 1997 pemerintah belum memiliki hutang domestik, tetapi pada tahun 2002 hutang dalam negeri pemerintah mencapai Rp 629 trilyun atau sekitar 37 persen dari PDB, dan pada tahun 2003 diperkirakan mencapai Rp 624 trilyun atau sekitar 32 persen dari PDB. Sementara hutang luar negeri pada tahun 1998 mencapai US\$ 67.3 miliar atau sekitar 56.5 persen dari PDB dan pada tahun 2003 mencapai US\$ 74.5 miliar atau sekitar 33.4 persen dari PDB. Besaran hutang domestik dan luar negeri pemerintah secara jelas menunjukkan telah terjadinya lonjakan luar biasa dari beban pemerintah untuk mengatasi krisis ekonomi dan menstimulus pertumbuhan ekonomi.

Pengaruh terbesar dari meningkatnya hutang pemerintah adalah signifikannya pembayaran hutang yang harus dilakukan oleh pemerintah, baik untuk pokok hutang maupun untuk pembayaran bunganya. Data menunjukkan bahwa pembayaran hutang terbesar dicapai pada tahun 1998 dan 1999, kemudian relatif menurun pada tahun-tahun berikutnya. Penurunan ini disebabkan karena sejak tahun 2000–2003 pemerintah belum membayar cicilan pokok hutang luar negeri, antara lain karena memperoleh penjadwalan hutang melalui skema Paris Club I, II dan III. Namun demikian, pembayaran bunga hutang luar negeri relatif stabil sejak tahun 2001–2003.

Di sisi lain, pembayaran hutang dalam negeri memperlihatkan kenaikan yang signifikan pada tahun 1999–2003 dibandingkan pada tahun 1998. Kenaikan pembayaran hutang disebabkan oleh besarnya beban pembayaran bunga obligasi rekapitalisasi perbankan, obligasi penjaminan perbankan dan BLBI yang harus dikeluarkan oleh pemerintah. Namun demikian, sejak tahun 1998 hingga tahun 2001 pemerintah belum melakukan pembayaran pokok hutang dalam negeri. Baru pada tahun 2003 pembayaran pokok hutang (jatuh tempo obli-

gasi) meningkat pesat yaitu sebesar Rp 21.7 triliun, yang jauh lebih besar dibandingkan dengan pembayaran pokok hutang tahun 2002 (Rp 3.9 triliun). Salah satu hasil simulasi yang dilakukan oleh Departemen Keuangan mengenai beban pembayaran hutang domestik memperlihatkan bahwa pemerintah diperkirakan akan mengalami tekanan anggaran yang besar pada tahun 2008 dan 2009, dengan jatuh temponya obligasi pemerintah senilai masing-masing Rp 122.8 triliun dan Rp 127.1 triliun. Saat tersebut adalah tahun-tahun sensitif karena Indonesia sedang mempersiapkan dan mengadakan Pemilu yang secara sosial politik merupakan tahun-tahun kritis.

Masih berdasarkan hasil simulasi yang sama, situasi anggaran pemerintah pada tahun 2004 diperkirakan akan relatif stabil dibandingkan pada tahun 2003. Defisit anggaran diperkirakan akan mencapai -0.5 persen dari PDB (2004) dibandingkan dengan -1.3 persen dari PDB (2003). Namun demikian, pelunasan hutang masih cukup besar yaitu sekitar Rp 36.0 triliun (domestik) dan Rp 46.1 triliun (luar negeri), sementara pada tahun sebelumnya (2003) masing-masing sebesar Rp 18.6 triliun dan Rp 43.5 triliun. Angka-angka ini mengindikasikan diperlukannya upaya besar dan serius dari pemerintah untuk mengatasi masalah hutang domestik dan luar negeri. Untuk itu, secara konkrit pemerintah dan segenap masyarakat perlu bahu membahu untuk:

- menekan kebocoran anggaran,
- sedapat mungkin melakukan penjadwalan kembali hutangnya, terutama hutang luar negerinya (dengan keluarnya Indonesia dari program IMF, penjadwalan hutang luar negeri dapat dilakukan melalui pendekatan-pendekatan bilateral),
- mencari sumber-sumber pendapatan baru, dengan meningkatkan efektifitas dan efisiensi perpajakan serta mengatasi penyelundupan, dan
- mengalokasikan anggaran secara cermat (menghindari pemborosan) baik di pusat maupun di daerah-daerah, dengan menekankan pada kegiatan-kegiatan produktif yaitu yang dalam jangka panjang memberikan dampak multiplier.

Tanpa kerja keras pemerintah dan seluruh komponen masyarakat, masalah hutang yang dipaparkan di atas bisa menjadi masalah yang sangat serius di masa yang akan datang, yakni terancamnya keberlanjutan fiskal kita. Dampak dari hal ini tidak hanya akan mengganggu

stabilitas perekonomian, namun juga dapat mengganggu stabilitas sosial dan politik secara nyata.

Dalam kaitannya dengan sektor moneter, pada tahun 2003, kebijakan moneter diperkirakan akan dilaksanakan secara konsisten dan berhati-hati guna menyerap kelebihan likuiditas tanpa mengorbankan momentum pemulihan ekonomi. Upaya tersebut dilakukan dengan mengendalikan uang primer melalui kombinasi operasi pasar terbuka (OPT), sterilisasi valuta asing, dan intervensi rupiah secara optimal guna mengendalikan laju inflasi. Inflasi masih menjadi indikator ekonomi yang perlu terus dikendalikan. Memang ada negara, seperti Brasilia dan Korea Selatan, yang menunjukkan bahwa inflasi tidak menghambat pertumbuhan. Namun pengalaman dari berbagai negara yang mengalami inflasi sedang dan inflasi tinggi menunjukkan bahwa inflasi berpengaruh buruk terhadap investasi (termasuk *Foreign Direct Investment*), *equity*, efisiensi, dan perdagangan. Inflasi dapat bersifat seperti pajak, yang mengurangi daya beli atau pendapatan riil. Inflasi yang relatif rendah dan stabil akan berpengaruh baik bagi pembangunan ekonomi Indonesia.

Dengan stabilitas politik dan keamanan yang tetap terpelihara baik, kurs rupiah akan ditentukan oleh fundamental ekonomi. Penjadwalan kembali hutang melalui Paris Club III, peningkatan efektifitas pencairan pinjaman luar negeri, dan peningkatan iklim investasi termasuk pada pasar modal di dalam negeri diperkirakan meningkatkan stabilitas rupiah pada nilai tukar sekitar Rp. 9.000 per dollar AS. Dengan kurs sekitar Rp 9.000 per dollar AS dalam tahun 2003 tersebut, komoditi ekspor nasional diperkirakan masih mampu bersaing di pasar internasional.

Dengan laju pertumbuhan uang primer yang tetap terkendali dan stabilnya kurs rupiah serta dengan memperhitungkan kenaikan harga BBM, tarif dasar listrik, dan telepon, laju inflasi dalam keseluruhan tahun 2003 diperkirakan sekitar 9 persen (lebih rendah dibandingkan tahun 2002 yaitu 10,1 persen). Kecenderungan menurunnya laju inflasi, rendahnya suku bunga internasional, dan harapan menurunnya *risk premium* (terutama jika persiapan-persiapan pelaksanaan Pemilu 2004 berjalan lancar) selanjutnya memberi ruang gerak yang lebih longgar bagi BI untuk menurunkan suku bunga SBI, sehingga suku bunga pinjaman juga diharapkan akan mengalami penurunan.

Dengan berbagai perkembangan tersebut di atas, perekonomian nasional tahun 2003 diperkirakan tumbuh 4 persen, sedikit lebih

tinggi dibandingkan laju pertumbuhan ekonomi tahun 2002 yaitu 3,7 persen. Pertumbuhan tersebut bersumber pada peningkatan permintaan domestik seperti konsumsi rumah tangga, dan dari sisi produksi, pertumbuhan ekonomi tahun 2003 terutama didorong oleh pulihnya industri pengolahan non-migas yang diperkirakan tumbuh sekitar 6,4 persen. Rendahnya perkiraan laju pertumbuhan tersebut hendaknya menjadi pemicu bagi kita semua untuk bekerja lebih keras. Melalui kerja keras yang terencana dengan baik, saya yakin bahwa potensi berbagai sumberdaya yang kita miliki akan dapat kita wujudkan, sehingga tingkat kesejahteraan kita semua dapat diperbaiki secara lebih memadai dalam tempo yang tidak terlalu lama. Untuk itu, kita perlu memiliki agenda pemulihan dan pembangunan yang jelas.

Agenda Pemulihan dan Pembangunan Kembali Ekonomi Indonesia : Penciptaan Peluang

Secara politik kita menghadapi kenyataan bahwa proses demokratisasi kita sedang berjalan menemukan bentuk terbaiknya. Hubungan antar komponen negara (eksekutif, legislatif, dan yudikatif), hubungan antara negara dengan masyarakat, hubungan antara negara dengan pelaku bisnis, dan hubungan antara masyarakat dengan pelaku bisnis, serta hubungan antara pusat dan daerah sedang dalam proses transisi, yang juga sedang berjalan menemukan bentuk terbaiknya. Semua ini menjanjikan kebaikan-kebaikan di masa datang. Semua ini melahirkan peluang-peluang, yaitu peluang untuk kebaikan bersama dan peluang bagi bisnis untuk tumbuh dan berkembang.

Namun demikian, kita harus menyadari bahwa kebaikan dan peluang yang tercipta tersebut juga membutuhkan korbanan-korbanan yang selama ini telah diberikan oleh masyarakat. Korbanan-korbanan ini harus kita kelola bersama secara baik karena jika tidak dan jika korbanan-korbanan ini melebihi kapasitas kita sebagai bangsa dan negara untuk menopangnya, tidak mustahil akan lahir permasalahan-permasalahan baru yang justru bisa membalik harapan dan peluang yang telah terbentuk tersebut.

Mari kita berefleksi atas pengalaman lima tahun krisis yang kita hadapi. Ambruknya bangun politik dan ekonomi Indonesia telah mengharuskan kita untuk secara bersama berkorban membiayai dampak negatif dan proses untuk keluar dari krisis dengan biaya yang tidak sedikit. Di samping tersedotnya dana masyarakat —baik dalam bentuk biaya penataan politik, rekapitalisasi perbankan, beban hutang

dalam dan luar negeri yang terus meningkat, dan lain-lain korban—kita masih menghadapi kenyataan (terutama pada tahun-tahun pertama krisis) semakin meningkatnya pengangguran, semakin melemahnya daya beli masyarakat sebagai cerminan dari tingginya tingkat kemiskinan, semakin meningkatnya ketimpangan kesejahteraan antar kelompok masyarakat dan antar daerah, semakin meningkat dan semakin kasarnya korupsi yang terjadi baik di pusat maupun di daerah, semakin meluruhnya infrastruktur ekonomi kita, dan tetap tingginya *country risk* sehingga menjadi faktor penghambat dalam melakukan perdagangan, investasi dan hubungan internasional.

Korbanan-korbanan tersebut harus kita kelola dengan baik meski saat ini kita menghadapi kenyataan bahwa ukuran dan pertumbuhan PDB kita sebagaimana telah diuraikan di atas masih kecil. Prospek pertumbuhan ekonomi kita yang masih sekitar 4 persen merupakan kenyataan. Dan, juga kenyataan bahwa pada tingkat pertumbuhan ini, pengangguran dan kemiskinan masih merupakan fenomena nyata yang harus kita hadapi. Dalam jangka pendek, dengan demikian, kita harus mampu menyediakan lapangan kerja yang cukup untuk mengimbangi besarnya pengangguran, meningkatkan daya beli masyarakat untuk mengatasi kemiskinan, meningkatkan pemeliharaan dan mengembangkan infrastruktur kita.

Dari data pertumbuhan yang telah diuraikan dalam sub-bab di atas, tampak bahwa peranan investasi dan ekspor masih sangat kecil bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia yang juga masih kecil tersebut. Padahal pada investasi dan ekspor inilah kita berharap pertumbuhan ekonomi kita dapat kita pacu pada saat peranan pemerintah dalam memacu pertumbuhan ekonomi sedang demikian rendahnya. Apabila Indonesia ingin meningkatkan ekspor, maka kita harus siap untuk lebih membuka perekonomian atau melaksanakan perdagangan internasional. Pengalaman dari banyak negara berkembang, termasuk Indonesia, menunjukkan bahwa perekonomian yang lebih terbuka relatif lebih baik daripada perekonomian yang tertutup. Perekonomian yang lebih terbuka, di samping dapat memperoleh manfaat alokatif dan dinamik dari perdagangan internasional, juga menunjukkan daya tahan yang lebih besar terhadap guncangan, menarik *Foreign Direct Investment* lebih besar, memperkaya pertumbuhan melalui keterkaitan ekspor dan investasi domestik, memperoleh rangsangan untuk memajukan teknologi melalui kompetisi ekspor, dan meningkatkan akses terhadap teknologi yang lebih maju dari impor.

Rendahnya proyeksi pertumbuhan ekonomi kita tahun 2003 serta masih rendahnya kontribusi investasi dan ekspor dalam pertumbuhan memberikan gambaran bahwa kita masih akan menghadapi persoalan pengangguran, daya beli masyarakat, serta pemeliharaan dan pengembangan infrastruktur di masa-masa yang akan datang. Dalam konteks semacam ini peranan bisnis seharusnya semakin menonjol. Sayangnya, peranan ini terus menurun sejalan dengan menurunnya investasi (baik domestik maupun asing), baik oleh karena semakin melemahnya daya saing produk-produk domestik kita di pasar domestik dan pasar internasional maupun oleh karena beban kesalahan masa lalu. Ekonomi pemilu (*election economy*) yang kita hadapi di tahun 2003 dan 2004, sebagaimana di negara-negara lain, akan bisa berkontribusi pada melemahnya perekonomian kita (walau ekonomi pemilu juga mampu membuka peluang-peluang bisnis baru).

Oleh karena itu, kita harus melakukan terobosan-terobosan perekonomian yang nyata melalui proses politik yang tepat atau sesuai dengan tantangan yang kita hadapi. Kita perlu melakukan konsolidasi demokrasi dan konsolidasi politik dalam negeri untuk mendukung terciptanya iklim investasi yang baik, sehingga bisnis akan berkembang secara sehat dengan aturan-aturan main yang jelas, terukur, dan *enforceable*.

Mari kita tata langkah pembangunan politik dan ekonomi kita ke depan. **Yang pertama**, proses peluruhan yang terjadi harus dihentikan dan dibalik arahnya sampai suatu tingkat di mana masyarakat bersepakat bahwa tingkat ini merupakan suatu tingkat minimal kesejahteraan atau kepuasan untuk bisa melakukan tahapan reformasi dan rekonsiliasi yang damai tapi pasti arahnya. Tahapan ini biasanya saya sebut sebagai tahapan *recovery* dalam artian yang sangat luas, yaitu terbangunnya kembali *social trust* yang menjamin *economic recovery* dan *economic stability* dengan konsensus nilai baru bisa diwujudkan. Secara ekonomi, kita akan mampu mengembalikan kapasitas produksi kita sehingga para penganggur akan bisa kembali bekerja dan daya beli masyarakat dapat terbantu untuk ditingkatkan.

Di samping itu, pertanian yang selama ini masih tertinggal sesungguhnya mampu memberikan sumbangan yang nyata terhadap pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja. Suatu analisis menunjukkan bahwa dengan meningkatkan pengeluaran pembangunan terhadap sektor pertanian sebesar 10 persen diharapkan akan mampu menyumbangkan peningkatan pertumbuhan output sektor

tersebut sebesar 6 persen dan peningkatan penyerapan tenaga kerja secara signifikan. Oleh karena itu, di samping mengembalikan kapasitas produksi industri kita, dalam jangka pendek ini, pertanian harus dibangkitkan melalui peningkatan pengeluaran pemerintah, yang alokasinya harus dilakukan secara tepat dan terarah (terutama untuk perbaikan dan peningkatan kualitas infrastruktur sehingga mobilitas input-input dan hasil produksi meningkat secara nyata), serta melalui pemberdayaan para petani atau kelompok tani dengan melaksanakan berbagai penataan kelembagaan pertanian. Pemberdayaan petani dan penguatan kelembagaan pertanian ini sekaligus merupakan upaya-upaya pembangunan jangka menengah-panjang bersama-sama dengan peningkatan teknologi budidaya dan pasca-panen. *Indegenous knowledge* dan sejarah perkembangan pertanian di kawasan setempat merupakan faktor yang harus diperhatikan dalam merancang dan menjalankan upaya-upaya tersebut. Hal ini sejalan dengan Stiglitz (1991, p.26) yang mengemukakan:

“...history itself... [brings] individuals [to] know more about the institutions and conventions with which they have lived in the recent past than they know of others by which they might live. ...to understand current technology we must also look to history; ... past history determines which techno-logies are developed, and therefore determines the shape of the available opportunity to set today.”

(“ ...sejarah itu sendiri ... mengajarkan setiap orang untuk mengetahui lebih banyak tentang kelembagaan dan kebiasaan di mana selama ini mereka hidup dibandingkan kelembagaan dan kebiasaan di mana mereka akan hidup ... kita harus mempelajari sejarah untuk memahami teknologi yang berkembang saat ini ... sejarah masa lalu menentukan teknologi apa saja yang berkembang; dan, tentunya menentukan pilihan-pilihan yang tersedia saat ini ...”)⁷

Kemitraan dalam suatu kesejajaran yang bersifat saling menguntungkan antara para petani serta UKM dengan bisnis perlu ditingkatkan. Kemitraan yang bersifat riil (baca: tidak artifisial) akan dapat tercipta jika disediakan insentif ekonomi yang fair, di samping “aturan main” yang jelas dan transparan. Dengan cara ini, bisnis dan petani

7 Terjemahan bebas penulis atas sitiran di atas.

serta UKM akan bisa berkembang secara bersama-sama. Sangat banyak UKM bergerak di sektor pertanian dan perdesaan, misalnya dalam bidang agroindustri. Oleh karenanya, program-program pembangunan pertanian dan perdesaan yang lebih seksama juga akan meningkatkan peran UKM dalam pembentukan kapital dalam masyarakat.

Dengan tingkat perhatian yang proporsional, upaya-upaya pengembangan UKM di perkotaan (di mana para pelaku sektor informal banyak terdapat) juga perlu dilakukan. Upaya ini bukan semata-mata untuk menjadikan UKM atau sektor informal tersebut sebagai “wadah penampung kelebihan tenaga kerja dari sektor lain” namun juga mendorong secara sistematis dan terus menerus ke arah terciptanya UKM yang tangguh dan iklim berusaha yang sehat serta kompetitif-yang-berkeadilan. Saya kira, hanya dengan kondisi inilah para pelaku UKM serta sektor informal dapat ditingkatkan kesejahteraannya. Upaya tersebut perlu difikirkan secara baik sehingga dimensi “M” (“menengah” dari kata UKM) dapat terisi secara memadai, yang artinya harus tercipta suatu mekanisme yang baik sehingga para pengusaha kecil berkinerja tinggi dapat “naik kelas” menjadi pengusaha skala menengah. Sehingga, struktur usaha (industri) yang selama ini kurang sehat (yang dikenal dengan *hollow of the middle*) dapat diperbaiki melalui mekanisme pasar yang secara simultan diiringi dengan kebijakan pemerintah yang pada dasarnya merupakan dukungan (insentif) yang tidak bersifat distortif untuk mencapai struktur tersebut.

Struktur perekonomian yang sehat hanya akan dapat dicapai jika sumberdaya alamnya dapat dikelola secara baik dan lestari. Perlu ditekankan bahwa belum pernah ada negara yang memiliki sumberdaya alam yang besar dapat tumbuh maju dan berkelanjutan dengan mengabaikan pertaniannya. Umumnya negara-negara yang maju saat ini berawal dari pembangunan pertanian yang kuat dan kemudian tumbuh menjadi negara industri yang modern. Pertanian memiliki kontribusi yang besar untuk dapat menciptakan struktur ekonomi yang baik dan kokoh. Pertanian dalam pembangunan ekonomi memberikan sumbangan dalam bentuk pangan bagi seluruh elemen masyarakat, faktor produksi bagi perusahaan, modal bagi pertumbuhan industri, dan sumber perolehan devisa. Dalam lingkup yang lebih luas, sektor pertanian juga berperan sebagai pasar yang potensial bagi produk-produk industri serta penyerap tenaga kerja.

Yang kedua, pertumbuhan ekonomi akan dapat berkelanjutan bila produktifitas masyarakat tinggi dan terus meningkat. Untuk ini, kebijakan, manajemen ekonomi, aturan main, dan kualitas sumberdaya manusia perlu terus ditingkatkan karena faktor-faktor inilah penentu utama dari peningkatan produktivitas masyarakat yang menjamin *sustained growth*. Demikian juga kita harus menemukan sumber-sumber pertumbuhan baru yang sensitif terhadap realita masyarakat dan dalam kerangka tatanan ekonomi dunia yang terus berkembang. Sumber-sumber pertumbuhan yang berkualitas ini harus sensitif bagi masyarakat baik dalam perspektif lokasi, tingkat perkembangan, maupun keadilan.

Pertumbuhan yang berkualitas tidak akan “menomer-duakan” pengentasan kemiskinan. Penurunan angka kemiskinan secara nyata perlu tetap menjadi tujuan pembangunan yang utama. Pengetahuan tentang kemiskinan dan hubungan antara kemiskinan dengan kecenderungan perubahan sosial-ekonomi telah banyak dianalisis. Upaya untuk mengurangi kemiskinan tidak dapat hanya dibebankan pada maksimisasi pertumbuhan dan memperbaiki fungsi pasar semata. Berbagai kebijakan perlu ditambahkan untuk:

- mengurangi disparitas pendapatan,
- memperbaiki akumulasi human capital,
- memperbesar kesempatan kerja, dan
- menyediakan *safety-net* bagi kelompok masyarakat yang rentan.

Untuk ini, pemerintah bersama masyarakat dan dunia bisnis harus bisa melahirkan program-program keharusan konstitusi seperti jaminan kesehatan, jaminan pendidikan, jaminan pekerjaan, jaminan pangan, dan keharusan konstitusi lainnya yang bisa dijangkau oleh kemampuan kita dari waktu ke waktu. Dengan jaminan ini, kualitas sumberdaya manusia kita akan meningkat dan ini merupakan *social capital* yang penting dalam pembangunan ekonomi ke depan. Program ini tidak mungkin bisa dijalankan sendiri oleh pemerintah. Oleh karenanya *outsourcing* dan mekanisme *public-private partnership* menjadi pilihan yang layak, tidak hanya demi tercapainya *good effective governance* semata tetapi hal ini memang bisa menjamin sistem *delivery* yang berkelanjutan, efisien dan dengan aturan main dan kebijakan yang baik juga akan sustainable. Pada bagian inilah reformasi kelembagaan telah menjadi keharusan untuk bisa melakukan *delivery* jasa-jasa publik secara baik. Tahap kedua ini merupakan sebagian dari pro-

gram reformasi yang telah saya sampaikan di berbagai kesempatan.

Yang ketiga, pengembangan ekspansif dari sistem ekonomi kita ke depan. Inilah tahapan di mana sumber-sumber ekonomi berkualitas yang kita miliki kita kembangkan lebih lanjut. Pertanian, perikanan, dan lokasi-lokasi pertumbuhan baru di Indonesia Timur harus kita kembangkan secara nyata. Progres dalam pengertian pembangunan berskala besar dari semua potensi yang kita miliki kita lakukan. Untuk ini, perencanaan dan kebijakan pembangunan yang visioner—stabilitas, kesejahteraan, keadilan, demokrasi, dan kemanusiaan—dalam kerangka aturan hukum yang jelas dan *enforceable* telah bisa dibangun konsensusnya oleh pemerintah. Pada tahapan ini, peranan investasi swasta dan peranan bisnis akan dominan. Dan, program ini akan mewarnai tiga agenda nasional, yakni (1) *Recovery*; (2) Reformasi dan Rekonstruksi; serta (3) Rekonsiliasi dan *Nation Building* yang juga telah saya kedepankan di mana-mana.

Berdasarkan tahapan dan proses seperti itulah swasta diharapkan akan mampu mengembangkan berbagai potensi sumber-daya dan menangkap peluang bisnis dan pasar yang berkembang, baik di pasar domestik maupun di pasar internasional.

Menuju Era Kemakmuran Bersama : Visi, Kepemimpinan, dan Kerja Keras Bersama

Membangun Kemakmuran Bersama yang Berkeadilan sebagai Suatu Keniscayaan

Dalam lima bab pertama buku ini telah saya uraikan bagaimana kondisi perekonomian kita sejak dilanda krisis dan bagaimana hal ini berpengaruh luas pada kehidupan masyarakat, perkembangan dunia usaha dan sistem produksi, serta sistem ekonomi politik nasional. Secara khusus, melalui pengamatan yang seksama, juga telah saya uraikan bagaimana krisis ekonomi yang belum berkesudahan ini melahirkan kegelisahan bersama —suatu kegelisahan akan masa depan kita sebagai bangsa dan negara—untuk segera bangkit dan segera membangun kesejahteraan bersama secara berkeadilan. Kegelisahan bersama ini terartikulasikan secara baik oleh masyarakat dalam bentuk harapan akan adanya terobosan untuk segera keluar dari krisis dan akan adanya kepemimpinan politik yang mempunyai visi ke depan yang jelas dan yang betul-betul sensitif pada harapan-harapan masyarakat. Dan, memang, saya yakini bahwa dalam masa krisis seperti inilah lahir kesempatan untuk melakukan perubahan-perubahan yang mendasar tentang penataan masa depan kita. Dengan visi bersama yang jelas, dengan kepemimpinan politik yang menjangkau masa depan dan sensitif terhadap keinginan masyarakat di tengah perubahan internasional yang berlangsung secara cepat, serta dengan kerja keras bersama, saya meyakini bahwa era kemakmuran bersama secara berkeadilan merupakan suatu keniscayaan.

Dengan pendekatan ekonomi politik —khususnya dalam kerangka pemikiran Troika yang banyak dikenal dalam telaah *good governance*—telah pula saya uraikan sebab-sebab utama krisis yang kita

alami. Dengan menelaah pola hubungan antara negara, pasar, dan masyarakat, kita memahami bahwa pola hubungan ekonomi politik yang tidak sehat di antara ketiga komponen Troika ini telah menentukan lemahnya pondasi ekonomi nasional, lemahnya akumulasi kesejahteraan masyarakat, dan meluasnya ketidakadilan yang ada dan dirasakan masyarakat. Artinya, pola hubungan parasitik antara negara (khususnya pemerintah) dan pasar (khususnya dunia usaha) di masa lalu telah menjadi penyebab utama runtuhnya sendi-sendi kehidupan kita sebagai bangsa dan negara karena pola hubungan ini —walau pada awalnya terjadi dalam konteks kepentingan ekonomi—ternyata telah melahirkan ketidakadilan yang berimbas pada meluasnya persoalan-persoalan politik dan sosial. Pembangunan ekonomi kita ke depan mengharuskan penataan pola hubungan ini.

Pola hubungan yang tidak sehat di antara ketiga komponen Troika tersebut telah melahirkan inefisiensi yang tidak terkira dalam sejarah pembangunan ekonomi kita. Inefisiensi ini berujud pada tidak tepatnya alokasi anggaran publik—baik dalam bentuk tidak sesuainya prioritas pembangunan maupun dalam bentuk penggelembungan anggaran— untuk pembangunan, berkembangnya budaya pengejaran rente ekonomi dengan memanfaatkan peluang kebijakan ekonomi, berkembangnya ekonomi ilegal dalam bentuk penyelundupan atau kegiatan ilegal lainnya, serta bentuk-bentuk inefisiensi lainnya.

Pola hubungan yang tidak sehat tersebut juga merupakan sumber-sumber ketidakadilan yang ada dan dirasakan oleh masyarakat. Ketidakadilan ini tercermin dari biasanya pembangunan ekonomi kita pada kepentingan-kepentingan sekelompok kecil masyarakat dan perkotaan yang merupakan sumber *noise* politik kekuasaan. Inilah dasar terjadinya kenyataan bahwa akumulasi kesejahteraan terutama terjadi hanya di perkotaan dan di sekelompok kecil anggota masyarakat yang dekat dengan kekuasaan dan/atau yang mempunyai kemampuan untuk mempengaruhi kekuasaan.

Secara akumulatif, pola hubungan yang tidak sehat inilah yang melahirkan tidak berkembangnya perdesaan, tidak berkembangnya pertanian dan kesejahteraan petani, nelayan, buruh, dan sebagian terbesar masyarakat kita. Dan, dapat dipastikan bahwa hal ini akan melahirkan pola pembangunan ekonomi yang tidak sensitif pada penciptaan lapangan kerja karena pola pembangunan yang dilakukan tidak mencerminkan realitas ekonomi yang ada. Biasanya sektor dan wilayah yang dikembangkan melalui hubungan kolusif parasitik yang

ada juga melemahkan inisiatif ekonomi masyarakat. Kemiskinan yang lahir terutama oleh lemahnya akses masyarakat pada semua faktor yang memberdayakan secara ekonomi tentu menjadi bagian umum dari persoalan yang kita hadapi sehari-hari.

Pola hubungan tersebut juga secara alamiah akan melahirkan pola hubungan antara kota dan desa, antara pertanian dan industri, antara buruh dan profesional, dan antar wilayah yang sangat timpang. Pembangunan ekonomi dalam konteks tatanan ekonomi politik semacam ini tidak lebih hanyalah proses akumulasi kesejahteraan secara cepat oleh sekelompok kecil masyarakat yang dekat dengan kekuasaan. Jadi tidak mengherankan bila infrastruktur ekonomi perdesaan dan infrastruktur ekonomi Indonesia Timur jauh tertinggal dari perkotaan dan Indonesia Barat. Infrastruktur yang tidak memadai ini semakin mengalami peluruhan dalam masa krisis ini karena sulitnya memobilisasi dana untuk pemeliharaan dan membangun infrastruktur yang ada. Dan, dalam hal pemeliharaan, infrastruktur kita yang di perkotaan pun telah mengalami peluruhan, apalagi yang di perdesaan.

Kita memang agak kurang beruntung sebagai bangsa. Persoalan hubungan parasitik-kolutif yang menyebabkan krisis berkepanjangan ini ternyata masih belum tertata secara baik meski kita telah mengalami krisis lebih dari lima tahun. Saya meyakini bahwa tanpa menyelesaikan hubungan troika secara baik akan sulit bagi kita untuk keluar dari krisis; dan, kalau kita sekarang merasakan ada perbaikan ekonomi makro, saya meyakini bahwa hal ini tidak akan berkelanjutan mengingat akar persoalan krisis belum kita atasi.

Lima tahun terakhir ini, kita telah mengalami pergantian pemerintahan sampai tiga kali. Persoalan utama yang saya maksud di atas masih pula belum terselesaikan. Bahkan ada kecenderungan pola hubungan kolutif-parasitik yang ada semakin berkembang sampai ke daerah-daerah melalui mekanisme politik kita yang masih belum sempurna. Mahalnya biaya politik dan mobilisasi politik telah mengharuskan pelaku-pelaku politik untuk secara sadar atau tidak mengakumulasi modal —melalui cara-cara yang berkait dengan kekuasaan dan kewenangan yang dimiliki—untuk kepentingan politik yang mereka masuki. Kenyataan politik ini tentu sangat mengkhawatirkan karena imbasnya pada persoalan kebangsaan dan kenegaraan yang lebih luas. Tidak berlebihan kiranya masyarakat mempertanyakan arah dan penataan ekonomi kita ke depan, termasuk di dalamnya mempertanyakan berbagai proses divestasi dan privatisasi

aset-aset negara dan badan-badan usaha milik negara. Masyarakat tidak tahu mau dibawa kemana perekonomian kita. Bahkan yang lebih mengkhawatirkan lagi, pada saat kita semakin menyadari betapa pentingnya kembali membangun perdesaan dan pertanian kita serta betapa pentingnya menjadikan pengentasan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, dan pembangunan infrastruktur sebagai fokus pembangunan ekonomi kita ke depan, kita masih menghadapi kenyataan bahwa ada sekelompok orang penting di pemerintahan dan kroni bisnisnya berusaha menjadikan wilayah Jabotabek —yang sudah menikmati pembangunan nasional selama ini—sebagai pusat investasi langsung asing di Indonesia. Hal ini tentu akan semakin mengorbankan masyarakat dan dunia usaha kita secara keseluruhan; dan, tentunya semakin menjauhkan harapan kita untuk bisa membangun kesejahteraan bersama secara berkeadilan.

Kenyataan tersebut mengharuskan kita secara bersama-sama untuk membebaskan diri dari belenggu tatanan ekonomi politik yang kolusif-parasitik sebagaimana dimaksud. Tanpa penataan kembali pola hubungan troika yang berkelanjutan dan demokratis, sulit diharapkan bangsa ini untuk bisa keluar dari krisis; dan, sulit diharapkan untuk mewujudkan cita-cita kebangsaan dan kenegaraan kita secara berkelanjutan. Untuk tujuan ini, kita sebagai bangsa perlu mempersamakan visi dan membangun kesadaran bersama untuk terus berupaya mewujudkan nilai-nilai utama kebangsaan dan kenegaraan kita dengan terus berupaya untuk memperkayanya dengan nilai-nilai kontemporer yang berkembang di masyarakat. Untuk ini, kita memerlukan kepemimpinan yang visioner dan kerja keras bersama seluruh masyarakat. Akan lebih baik kita menghadapi kenyataan pahit sebentar untuk kehidupan kebangsaan yang adil dan makmur secara berkelanjutan di masa datang daripada kita harus terlena oleh kesemuan kenyataan yang justru menghancurkan sendi-sendi utama kehidupan kita sebagai bangsa dan negara.

Mempersamakan Visi dan Kesadaran Bersama

Sudah lima tahun bangsa dan negara kita dalam krisis. Tiga pemerintahan telah berganti, krisis masih berlangsung. Perekonomian kita masih belum pulih, proses perpolitikan kita masih belum menemukan bentuk terbaiknya, harmoni sosial masih rentan terhadap berbagai gangguan, keutuhan kebangsaan dan kenegaraan kesatuan kita masih terus mengalami cobaan. Kesejahteraan dan kualitas hidup

masyarakat kita —yang merupakan sebagian dari ukuran kemakmuran—merosot tajam dan ada kecenderungan untuk terus merosot. Kegamangan akan masa depan terus bergelayut dan menghantui pikiran dan langkah kita. Hubungan antara negara, pasar, dan masyarakat masih belum berubah dan nampaknya akan tetap menjadi penghambat untuk keluar dari krisis dan untuk membangun kemakmuran bersama secara berkeadilan. Kita memang sedang dalam krisis kebangsaan dan kenegaraan.

Kita sebagai bangsa hendaknya bersepakat bahwa kita memang dalam krisis. Ini adalah bentuk awal kesadaran kebangsaan kita—bentuk awal kesadaran untuk mencari jalan keluar dari krisis. Kesadaran ini mengharuskan kita untuk berpikir, bertindak, dan berperilaku sebagaimana layaknya bangsa yang sedang dilanda krisis. Dengan kesadaran ini, kita sebagai bangsa secara bersama berani mengorbankan kepentingan-kepentingan jangka pendek untuk kepentingan-kepentingan kebangsaan jangka panjang. Kita selayaknya memiliki tekad bersama untuk keluar dari krisis ini dan bertekad untuk mewujudkan kehidupan yang lebih baik dan berkelanjutan di masa datang, kehidupan bersama yang dicerminkan oleh terbangunnya proses perwujudan kemakmuran bersama yang berkeadilan.

Untuk itu, sebagai bangsa, kita harus memiliki visi bersama. Kita harus memiliki dan bersepakat atas nilai, keyakinan, arah, dan tujuan bersama sehingga kita bisa membangun perilaku bersama yang sesuai. Saya menyadari betapa hal ini tidak mudah dan betapa hal ini membutuhkan korbanan. Proses ini, saya sadari, membutuhkan keberanian dan korbanan yang lebih tinggi daripada keberanian yang dibutuhkan oleh serdadu yang berangkat berperang karena keberanian yang dimaksud di sini adalah keberanian kolektif kita sebagai bangsa. Keberanian yang dimaksud di sini adalah keberanian untuk meletakkan kepentingan kebangsaan dan kepentingan masa depan kita di atas kepentingan politik jangka pendek yang kita miliki.

Kesadaran akan perlunya membangun visi bersama tersebut saya pandang sebagai kesadaran kedua kebangsaan kita. Kesadaran ini memaknai kembali proses pembebasan bangsa ini dari krisis dan dari belenggu pemikiran yang menghambat terwujudnya proses pembangunan yang menjanjikan kemakmuran bersama yang berkeadilan. Berhubung kemakmuran bersama yang berkeadilan merupakan cita-cita dan amanah konstitusi, maka sebagai bangsa kita perlu membangun kesadaran kebangsaan ketiga, yaitu kesadaran dan tekad untuk

terus memperjuangkan dan mewujudkan cita-cata dan amanah konstitusi ini sejalan dengan perkembangan kebangsaan kita di tengah perubahan masyarakat dan perubahan internasional yang terus berlangsung. Saya menyadari bahwa agenda besar ini bukanlah tugas satu atau dua pemerintahan dan bukan pula tugas satu atau dua generasi; tetapi, dia merupakan tugas kebangsaan yang terus berkelanjutan. Dengan cara berpikir semacam ini, kesadaran akan kebangsaan, permasalahan kebangsaan, dan visi kebangsaan semakin menentukan keberlanjutan kita sebagai bangsa dan sebagai negara.

Konsekuensinya, setiap pemimpin Indonesia dituntut untuk mengajak dan memberikan arahan seluruh rakyat bangsa ini untuk secara terus menerus mengembangkan visi nasional kebangsaan kita. Pemimpin Indonesia, lebih lanjut, secara demokratis harus pula mampu membangun suatu strategi besar (*grand strategy*) guna mewujudkan tujuan nasional dan tujuan kebangsaan yang tergambarkan dalam visi tersebut. Strategi besar semacam ini dimiliki oleh banyak negara dengan tujuan untuk mempersatukan bangsanya menuju masa depan yang dicita-citakan. Malaysia, sebagai contoh, di penghujung abad ke 20 yang lalu telah menetapkan cetak biru negara itu untuk suatu masa jauh ke depan, yang disebut sebagai Wawasan 2020. Kepemimpinan nasional ke depan —dengan memobilisasikan seluruh potensi nasional secara demokratis—dituntut untuk mampu memberikan visi kenegaraan ke depan dalam perspektif waktu yang cukup panjang. Tanpa kemampuan untuk membangun dan mengembangkan visi dan strategi besar semacam ini sulit diharapkan kepemimpinan ke depan untuk mampu mengentaskan bangsa dan negara ini dari krisis dan untuk mampu membangun bangsa dan negara secara berkelanjutan.

Cetak biru perjalanan bangsa ke arah masa depan tentu tidak begitu saja dirancang oleh satu-dua pemimpin betapapun bijak dan cerdasnya pemimpin tersebut; tetapi, harus berangkat dari sebuah konsensus. Pada masa pemerintahan Orde Baru, pembangunan nasional yang sering dituangkan dalam Pembangunan Jangka Panjang (25 tahun) dan Pembangunan Jangka Sedang (5 tahun) ada sebuah pilar yang terkenal dengan sebutan Trilogi Pembangunan, yaitu Stabilitas, Pertumbuhan dan Pemerataan. Pilar itu kini dianggap tidak memadai untuk menjawab tantangan pembangunan abad ke 21, terutama tidak ditetapkannya demokrasi sebagai nilai universal yang mesti diadopsi oleh setiap negara. Itulah sebabnya di berbagai kesempatan saya kede-

pankan bahwa sosok negara yang hendak kita tuju adalah Indonesia yang Stabil, Demokratis dan Sejahtera. Tentu saya tidak bermaksud untuk menawarkan Trilogi Baru —Stabilitas, Demokrasi dan Kesejahteraan—sebagai pengganti trilogi lama yang dinilai sudah tidak tepat lagi. Mungkin, patut pula kita pikirkan bahwa pilar-pilar di bawah ini barangkali dapat menjawab tantangan pembangunan bangsa ke depan serta sekaligus merupakan koreksi dan perluasan dari Trilogi Pembangunan masa lalu. Pilar-pilar tersebut adalah : Stabilitas, kesejahteraan, keadilan, demokrasi, dan kemanusiaan.

Dimensi dan pekerjaan besar yang saya sebutkan tadi, mulai dari membangun kesadaran bersama, menyatukan visi, membangun konsensus nasional, menetapkan strategi besar kenegaraan dan kebangsaan berikut tujuan dan sasaran strategisnya, tiada lain adalah sebuah politik besar kenegaraan dan kebangsaan (*grand politics*) kita. Bangsa Indonesia, yang pada penghujung abad ke 20 yang lalu dilanda oleh krisis yang besar, mengalami pergantian kepemimpinan politik yang sekaligus menandai berakhirnya tatanan kenegaraan dan pemerintahan. Bersamaan dengan itu, juga mengalami kemunduran dan kemandegan dalam berbagai aspek kehidupan bangsa. Kenyataan ini mengharuskan dilahirkannya suatu politik besar kenegaraan dan kebangsaan dengan tema penyelamatan dan pembangunan kembali Indonesia sesuai dengan cita-cita para pendiri republik yang telah diamanahkan dalam konstitusi negara. Dengan politik besar kenegaraan dan kebangsaan (*grand politics*) dan kemudian strategi besar kenegaraan dan kebangsaan (*grand strategy*) yang kita bangun bersama ini, akhirnya bangsa kita akan mampu melangkah bersama menuju ke sebuah era baru, yang tiada lain adalah era kemakmuran bersama yang berkeadilan.

Kepemimpinan yang Efektif dan Mewujudkan Harapan

Untuk sebuah pekerjaan yang besar dan penuh tantangan, negeri kita memerlukan hadirnya pemimpin dan tokoh-tokoh bangsa yang mampu memberikan harapan, menunjukkan arah, memberikan inspirasi serta semangat untuk menuju masa depan bangsa yang lebih baik. Pemimpin harus mampu memberikan pencerahan pada rakyatnya. Pemimpin harus mampu mempersiapkan rakyatnya untuk menuju masa depan yang lebih baik. Pemimpin harus mampu melembagakan visi kenegaraan dan kebangsaan ke dalam praksis politik kenegaraan dan kebangsaan. Pemimpin harus mampu menciptakan

ruang gerak yang leluasa bagi rakyatnya untuk menuju cita-cita bersama. Pemimpin harus mampu mengembangkan iklim dan budaya perubahan.

Pada masa krisis yang kita hadapi saat ini, kita merasakan susut dan pudarnya, dalam skala tertentu, kebanggaan kita sebagai bangsa. Pemimpin Indonesia harus mampu membangkitkan kembali semangat dan kebanggaan kebangsaan tersebut. Dalam masa ini, kita juga menyadari dan merasakan bahwa semangat dan kehendak bersama untuk berjuang secara kolektif dengan gigih untuk memperbaiki negeri ini mengalami penurunan. Pemimpin Indonesia harus mampu dan mendorong bangkitnya semangat kebangsaan untuk secara terus menerus melakukan perbaikan bersama. Dan, saya juga menyadari betapa dalam masa sulit ini banyak sekali orang yang enggan mengambil alih tanggung jawab kolektifnya. Pemimpin Indonesia harus mampu membangkitkan kembali semangat sosial ini.

Bagi Indonesia, pemimpin yang efektif adalah pemimpin yang bersama rakyatnya, memimpin dan mempelopori perubahan ke arah perubahan yang disepakati, yaitu perubahan yang secara demokratis telah dibangun konsensusnya. Jika negara ini ingin membangun dunia usaha yang sehat dan konstruktif bagi bangkitnya perekonomian nasional —yang pada gilirannya perkembangan ekonomi yang baik akan mendorong tercapainya kemakmuran bersama yang berkeadilan—maka pemimpin harus menempatkan diri pada proses dan upaya besar itu. Jika tiang-tiang penyangga bagi tumbuhnya dunia usaha yang baik adalah *good governance*, hubungan penguasa dan pengusaha yang sehat dan tidak kolusif, dan kesungguhan negara (pemerintah) untuk menciptakan iklim yang kondusif bagi berkembangnya dunia usaha, pemimpin harus mematuhi norma-norma itu dalam perilaku dan aktivitas kepemimpinannya, serta berdiri di depan untuk memberi contoh dan untuk mewujudkannya.

Kerja Keras Seluruh Rakyat

Kita tidak akan bisa mengatasi krisis dengan level kesadaran dan energi yang sama dengan kesadaran dan energi yang melahirkan krisis. Kita membutuhkan kesadaran dan energi yang jauh lebih tinggi levelnya. Hal ini bisa kita lakukan jika seluruh rakyat, secara kolektif, bersama para pemimpinnya juga bergerak dengan kesadaran dan energi yang lebih tinggi dari kesadaran dan energi sebelum krisis.

Ketika negeri ini telah memiliki visi dan strategi besar kenegaraan

dan kebangsaan (*grand strategy*) yang tepat, serta telah pula mendapatkan pemimpin dan tokoh yang berkemampuan untuk memimpin negara, bangsa, dan rakyat, maka faktor penting terakhir adalah adanya kesediaan rakyat untuk melangkah dan bekerja bersama. Keyakinan bahwa untuk mencapai kemakmuran bersama yang berkeadilan sebagai suatu keniscayaan mengharuskan lahirnya suatu kesadaran kolektif bahwa pemikiran, kerja, kemauan, semangat, dan kehendak rakyat untuk keluar dari krisis dan untuk mewujudkan masa depan yang lebih baik sebagai suatu keharusan, sebagai suatu nilai, dan sekaligus sebagai suatu *state of mind*.

Kisah sukses di banyak negara seperti Jepang, Korea Selatan dan banyak pula negara-negara Barat, ternyata tidak hanya disebabkan oleh tingginya ilmu pengetahuan, teknologi, dan budaya yang lebih mapan, tetapi terutama karena kerja keras bangsa yang bersangkutan. Rakyat dan masyarakat yang sadar akan nilai-nilai kerja kebangsaan serta kepemimpinan yang memberdayakan kekuatan-kekuatan rakyat merupakan kekuatan yang tidak ternilai bagi suatu bangsa. Kekuatan rakyat inilah sesungguhnya inti dari kekuatan perubahan yang kita harapkan ke depan, perubahan untuk membangun kemakmuran bersama yang berkeadilan.

Bibliografi

- Baker, Dean and Mark Weisbrot, 2002. *The Economic Costs of a War in Iraq: the Negative Scenario*, CEPR Briefing Paper. Washington D.C.: Center for Economic and Policy Research.
- Banerjee, Shuvojit, 2002. *Recovery and Growth in Indonesia Industry : Element of a Future Policy Framework*, Working Paper 02/08, UNSFIR. Jakarta: United Nations Support Facility for Indonesia Recovery.
- Banerjee, Shuvojit and Hermanto Siregar, 2002. *Agricultural As The Leading Sector: An Industrial Policy Framework*, Working Paper 02/02, UNSFIR. Jakarta: United Nations Support Facility for Indonesia Recovery.
- BAPPENAS, 2003. *Perekonomian Indonesia Tahun 2003: Prospek dan Kebijakan*. Jakarta: Bappenas.
- Chowdhury, Anis and Hermanto Siregar, 2002. *Indonesia's Monetary Policy Dilemma: Constraints of Inflation Targeting*, Working Paper 02/11, UNSFIR. Jakarta: United Nations Support Facility for Indonesia Recovery.
- Clinton, William Jefferson, 1996. *Between Hope and History: Meeting America's Challenges for the 21st Century*, New York: Times Books, Random House, Inc.
- Cunningham, William H., Ramon J. Aldag, and Stanley B. Block, 1993. *Business In a Changing World*, 3rd Ed. Ohio: South-Western Publishing Co.
- Frederick, William C., James E. Post, and Keith Davis, 1992. *Business and Society : Corporate Strategy, Public Policy, Ethics*, 7th Ed. Singapore: McGraw-Hill International Editions. McGraw-Hill Co.
- Goldsmith, Arthur A., 1996. *Business, Government , Society: The Global Political Economy*. Chicago: Irwin, a Times Mirror Higher Education Group, Inc.
- Harberger, Arnold C., 2001. *The View from Trenches Development Processes and Policies as Seen by Working Professional*. dalam Meier, Gerald M. dan Joseph E. Stiglitz (Eds), *Frontiers of Development Economics : The Future Perspective*. The World Bank and Oxford University Press.
- Hatta, Mohammad, 1950. *Kemerdekaan dan Kedaulatan Jembatan Ke Kemakmuran dan Keadilan*. Pidato pada Rapat Umum di Medan tanggal 21 November 1950.
- , 1950. *Masa Perjuangan Kita Sudah Habis Romantiknya*.

- Pidato pada Rapat Terbatas di Medan, Tanggal 21 November 1950.
- Hodess, Robin., et. al., 2003. *Global Corruption Report 2003 : Special Focus : Access to Information*. London: Transparency International, Profile Books Ltd.
- International Monetary Fund, 2002. *World Economic Outlook April 2002: Recession and Recoveries*. Washington D.C.: IMF.
- ISEAS, 2003. *Regional Outlook, Southeast Asia 2003 – 2004*, Annual. Singapore: Institute of Southeast Asian Studies.
- Jingwen, Li., 2000. *The Chinese Economy into the 21st Century : Forecasts and Policies*, 1st Ed. Beijing: Foreign Languages Press.
- Nordhaus, William D., 2003. *The Economic Consequences of a War with Iraq*, Chapter 3 In “War with Iraq: Costs, Consequences, and Alternatives”, Kaysen, Carl, Steven E. Miller, Martin B. Malin, William D. Nordhaus, and John D. Steinbruner (eds). Cambridge, MA.: American Academy of Arts and Sciences.
- Kotler, Philip, Somkid Jatusripitak, and Suvit Maesincee, 1997. *A Strategic Approach to Building Nations Wealth: The Marketing of Nations*. New York: The Free Press.
- Macintyre, Andrew, 1991. *Business and Politics in Indonesia*, Asian Studies Association of Australia – ASAA Southeast Asia Publications Series. NSW Australia: Allen & Unwin Pty Ltd.
- Mishra, Satish Chandra, 1999. *Government and Governance : Understanding the Political Economy of the Reform of Institutions*. Working Paper: 99/02, UNSFIR. Jakarta: United Nations Support Facility for Indonesia Recovery.
- Rodan, Garry, Kevin Hewinson and Richard Robison, 2002. *The Political Economy of South-East Asia: Conflicts, Crises, and Change.*, 2nd Ed. Reprinted. New York: Oxford University Press.
- Sen, Amartya K. 2001. *What is Development About?* dalam Meier, Gerald M. dan Joseph E. Stiglitz (Eds), *Frontiers of Development Economics : The Future Perspective*. The World Bank and Oxford University Press.
- Stiglitz, Joseph E. 1991. *Rational Peasants, Efficient Institutions, and a Theory of Rural Organizations: Methodological Remarks for Development Economics* In “The Economic Theory of Agrarian Institutions” (Ed.) Pranab Bardhan. Oxford: Clarendon Press.
- , 1997. Fourth Printing. *Whither Socialism?* Cambridge, MA.: Massachusetts Institute of Technology Press.
- Stiglitz, Joseph E. 2000. *Economics of the Public Sector*, 3rd ed. New York: W.W. Norton & Company.
- Stiglitz, Joseph E. 2002. *Globalization and Its Discontents*. Allen Lane. London: The Penguin Press.

- World Bank, 2003. *Indonesia Maintaining Stability, Deepening Reforms*: World Bank Brief for the Consultative Group on Indonesia. Jakarta: World Bank.
- Yudhoyono, Susilo Bambang., 2000. *Mengatasi Krisis Menyelamatkan Reformasi*, Cet. Kedua. Jakarta: Pusat Pengkajian Etika Politik dan Pemerintahan.
- Yusuf, S., Joseph E. Stiglitz. 2001. *Development Issues: Settled and Open* dalam “Frontiers of Development Economics – The Future in Perspective” (Ed.) Gerald M. Meir and Joseph Stiglitz. Washington D.C.: World Bank and Oxford University Press.